

Peran Tiongkok Dalam Konflik Suriah: Perspektif Teori *Quasi Mediation*

SKRIPSI



Oleh:

DIMAS RIZKI PERMADI

NIM: 16323062

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

Peran Tiongkok Dalam Konflik Suriah: Perspektif Teori *Quasi Mediation*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

DIMAS RIZKI PERMADI

16323062

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**PERAN TIONGKOK DALAM KONFLIK SURIAH: PERSPEKTIF TEORI
*QUASI MEDIATION***

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

22 NOV 2019

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Plt Ketua Program Studi

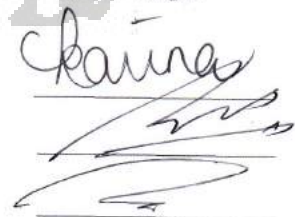
Anggar Euri Mardianto S.IP., M.A)

NIK. 133230101

Dewan Penguji:

1. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A
2. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A
3. Hasbi Aswar, S.IP., M

Tanda Tangan



PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dimas Rizki Permadi
No. Mahasiswa : 16323062
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Peran Tiongkok Dalam Konflik Suriah: Perspektif *Quasi Mediation*

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 November 2019

Yang menyatakan
**METERAI
TEMPEL**
506A3AHF090770372
6000
ENAM RIBU RUPIAH



Dimas Rizki Permadi

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Ayah dan Ibu

Untuk kedua orang tuaku tersayang, terimakasih atas kasih sayang, doa, dukungan, kesabaran, kerja keras yang telah kalian berikan. Semoga amalan ilmu yang saya sudah dan terus pelajari dapat selalu bermanfaat seperti pesan mama dan bapak selama ini, amin.

Adik

Adikku tercinta Arif Maulana dan Mirza Ikhsanul Galbi terimakasih untuk doa, kasih sayang, dan kebahagiaan yang telah kalian berikan, semoga karya ini bisa memotivasi kalian untuk menjadi orang-orang yang lebih hebat dari abang.

Semua Keluarga Besar

Terimakasih atas doa, nasehat, kasih sayang, dan kebaikan yang telah kalian semua berikan selama ini.

لَا تُكَلِّمُوا فِي دِينِكُمْ وَالْأَعْيُنِ

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ
كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِبِشْرِهِ مِدَادًا

Katakanlah Muhammad "Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (memahami) kalimat-kalimat Tuhanku, kami datangkan tambahan sesuai dengan itu (pula)."

QS. 18: 109

Tidak ada yang bisa mengalahkan keyakinan, kekuatan dan kerja keras

M. Zulfikar Rakhmat

لَا يَكْفُرُ بِاللَّهِ الْمُنْفَكُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

PRAKATA



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraa Kaatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah *Subhanallahu Wa Ta'la*, yang Maha Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, yang telah memberikan kelancaran kekuatan, dan kemudahan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga karya ini dapat saya selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Sebuah kebaikan bagi peneliti hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian ini, banyak pihak yang turut membantu saya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Fu'ad Nashori S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Enggar Furi Hardianto S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

4. Mas Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih atas arahan, diskusi, kesabaran, dan waktu yang telah diberikan bagi peneliti selama ini. Terimakasih atas motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan Mas Fikar dengan kebaikan yang lebih mulia.
5. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S selaku mantan Ketua Prodi Hubungan Internasional yang telah banyak memberikan pelajaran, motivasi, dan saran selama penulis mengikuti program CENA dan selama masa perkuliahan hingga selesai.
6. Seluruh dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga selesai.
7. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya yang telah mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada keluarga “Lurus Squad” Zeri dan Reyhan yang telah memberikan dukungan, semangat, kebaikan selama peneliti menjalani perkuliahan di
UUI.
9. Kepada Mudzi, Fikri, Amirul dan Ramadha yang telah memberikan semangat, dukungan, dan keceriaannya.
10. Kepada seluruh pengurus Earth Hour periode 2017/2018 atas pengalaman berorganisasi dan kebahagiaan yang telah diberikan.
11. Kepada seluruh pengurus CAMP Foundation 2017/2018 atas keceriaan dan ilmu yang telah diberikan.

12. Kepada seluruh pengurus Students X CEO Yogyakarta atas keseruan, keceriaan, dan pengalaman yang tidak terlupakan.
13. Kepada seluruh mahasiswa HI UII 2016 atas pertemanan, keseruan, pengalaman yang telah diberikan selama ini.
14. Terimakasih Gabila Nurentandia Zafira Nasution untuk dukungan dan doa selama peneliti mengerjakan skripsi.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR SINGKATAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I.1 LATAR BELAKANG..... | 1 |
| I.2 RUMUSAN MASALAH..... | 5 |
| I.3 TUJUAN..... | 5 |
| I.4 SIGNIFIKANSI..... | 5 |
| I.5 LINGKUP PENELITIAN..... | 6 |
| I.6 KAJIAN PUSTAKA..... | 6 |
| I.7 KERANGKA KONSEP..... | 11 |
| I.8 METODE PENELITIAN..... | 20 |
| I.9 PROSES PENELITIAN..... | 21 |
| BAB II KONFLIK SURIAH DAN PERAN MULTIFACETED TIONGKOK | 24 |
| II.1 Konflik Suriah..... | 25 |
| II.2 Kebijakan Tiongkok Dalam Konflik Suriah: Multifaceted Intervention..... | 30 |
| II.2.1 Tiongkok Sebagai Aktor Netral Dalam Konflik Suriah..... | 32 |
| II.2.2 Tiongkok Menjadi Tuan Rumah Dalam Upaya Dialog Damai..... | 36 |
| II.2.3 Utusan Khusus Tiongkok ke Suriah..... | 39 |
| BAB III FAKTOR PENDORONG QUASI MEDIATION TIONGKOK DALAM KONFLIK SURIAH | 41 |
| III.1 Relevan Dengan Kepentingan Komersial..... | 41 |
| III.1.1 Belt and Road Initiative (BRI) di Suriah..... | 42 |
| III.1.2 Hubungan Ekonomi Tiongkok Dengan Negara-Negara di Timur Tengah..... | 45 |
| III.2 Jangkauan Pengaruh Tiongkok (Internal)..... | 47 |
| III.2.1 Xi Jinping dan Konsep China Dream..... | 47 |
| III.2.2 Memperlihatkan Citra Tiongkok yang Aktif Ditatanan Internasional | 49 |
| III.3.1 Tiongkok Ingin Memiliki Teman Baru Di Timur Tengah..... | 51 |
| III.3.2 Tiongkok Ingin Menyebarkan Pengaruhnya Diluar Regional Asia Timur..... | 52 |
| III.4 Konsensus Kekuatan Besar..... | 53 |
| III.5 Tingkat Kesulitan Dalam Penyelesaian Konflik..... | 55 |
| BAB IV KESIMPULAN | 58 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV.1 Kesimpulan..... | 58 |
| IV.2 Rekomendasi | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Diplomasi *Quasi Mediation* dan Diplomasi Mediasi Umum.....13

Tabel 2.1 Upaya Diplomasi Multifaceted Tiongkok Di Konflik Suriah..40

Tabel 3.1 Faktor-faktor yang Mendorong Tiongkok Menggunakan *Quasi Mediation* “Multifaceted Intervention” Di Dalam Konflik Suriah.....57



DAFTAR SINGKATAN



| | |
|---------|--|
| WTO | : World Trade Organization |
| BRI | : Belt and Road Initiative |
| MENA | : Middle East and North Africa |
| MERICCS | : Mercator Institute for China Studies |
| SOHR | : The Syrian Observatory for Human Rights |
| PBB | : Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| ISIS | : Islamic state of Iraq and Syria |
| YPG | : Kurdish People's Protection Units |
| FSA | : Free Syrian Army |
| NCSROF | : National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces |
| PKC | : Partai Komunis Tiongkok |
| KTT | : Konferensi Tingkat Tinggi |
| UEA | : Uni Emirat Arab |
| UE | : Uni Eropa |

Abstrak

Konflik Suriah merupakan konflik yang terjadi akibat efek domino fenomena *Arab Spring* pada 2010 yang terjadi di Tunisia yang kemudian menyebar ke beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Suriah. Konflik Suriah tidak hanya dilatarbelakangi oleh terjadinya fenomena *Arab Spring*, melainkan juga karena kondisi Suriah yang tidak stabil pada masa pemerintahan Bashar al-Assad. Konflik tersebut telah melibatkan negara-negara *major power* untuk melakukan intervensi di konflik tersebut. Ditengah-tengah peran dominan AS dan Rusia di konflik Suriah, Tiongkok juga ikut terlibat aktif dalam melakukan mediasi kedua belah pihak yang sedang konflik. Pada tahun-tahun sebelum terjadinya konflik tersebut, Tiongkok merupakan negara yang enggan untuk terlibat dalam konflik-konflik di Timur Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Tiongkok di konflik Suriah menggunakan perspektif teori *quasi mediation* dimana temuan dari penelitian ini adalah keterlibatan Tiongkok berupa *Multifaceted Intervention*. Menggunakan teori tersebut, peneliti juga menemukan 4 alasan yang melatarbelakangi peran Tiongkok: pertama, Tiongkok ikut terlibat dalam konflik Suriah sebagai upaya pengamanan jalur *Belt and Road Initiative* BRI; kedua, Tiongkok sedang mencari teman baru kawasan Timur Tengah; ketiga, Tiongkok ingin menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah dari kelompok teroris; dan keempat, Tiongkok memiliki kepentingan untuk mengamankan pasokan energinya.

Kata Kunci: Konflik Suriah, Tiongkok, *Quasi Mediation*

Abstract

The Syrian conflict occurs due to the domino effect of the Arab Spring phenomenon in 2010 which took place in Tunisia which then spread to several countries in the Middle East, including Syria. The Syrian conflict was not only motivated by the occurrence of the Arab Spring phenomenon, but also because of the unstable Syrian conditions during the reign of Bashar al-Assad. The conflict has involved major power countries to intervene in the conflict. In the midst of the dominant role of the US and Russia in the Syrian conflict, China is also actively involved in mediating both sides of the war. In the years before the conflict, China was a country that was reluctant to get involved in the conflicts in the Middle East. This study aims to analyze Chinese policy in the Syrian conflict using the perspective of quasi mediation theory where this study finds that China's involvement in Syria is in the form of Multifaceted Intervention. Using this theory, this study also find four reasons behind China's policy: first, China was involved in the Syrian conflict as an effort to secure the Belt and Road Initiative (BRI) lane; second, China is looking for new friends in the Middle East; third, China wants to maintain the stability of the Middle East from terrorist groups; and fourth, China has an interest in securing energy supply.

Keywords: Syrian conflict, China, Quasi Mediation

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Tiongkok merupakan sebuah negara dengan pertumbuhan perekonomian yang sangat massif di dunia saat ini. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah terlihat sejak reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping diakhir tahun 1970an. Reformasi ekonomi tersebut berhasil menjadikan Tiongkok sebagai negara sasaran destinasi investasi terbesar di dunia dan menjadikan Tiongkok sebagai negara industri manufaktur terbesar di dunia, hal tersebut secara tidak langsung berdampak bagi pertumbuhan GDP dan industri di Tiongkok yang berkembang secara pesat pada tahun 2011 (China in the WTO: Past, Present and Future). Pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah mengalahkan AS, semenjak Tiongkok bergabung kedalam *world trade organization* (WTO) perekonomian Tiongkok terus mengalami peningkatan. Pada waktu yang sama, Tiongkok ingin lebih mengembangkan kiprahnya di dunia internasional, sebagaimana telah disampaikan oleh Xi Jinping dalam selogan pemerintahannya, *China Dream*. *China Dream* telah menjadi tema utama disebagian besar pidato Xi Jinping. Sikap yang dipromosikan Xi Jinping tersebut telah merubah arah kebijakan luar negeri Tiongkok setelah sebelumnya Deng Xiaoping mempromosikan kebijakan *Tao Guang Yang Hui* (tetaplah bersikap rendah hati, mencapai sesuatu). Dimana Xi Jinping memperkenalkan prinsip baru Tiongkok di kancah global yang disebut *Fen Fa You Wei* (terus menjaga kerendahan hati, secara aktif mencari untuk mencapai sesuatu) (Sørensen, 2015).

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Xi Jinping mengeluarkan kebijakan luar negerinya dalam proyek ambisius Tiongkok yang disebut *Belt and Road Initiative* (BRI). Xi berharap proyek tersebut akan menjadi jalur perdagangan terbesar di dunia yang akan menghubungkan Asia dan Eropa dan akan meningkatkan dua kali lipat pertumbuhan ekonomi negaranya dalam ulang tahun Tiongkok yang ke 100 tahun. Melalui forum-forum internasional Xi Jinping telah mempromosikan proyek ambisius tersebut kepada negara-negara lainnya, seperti pada 7 September 2013 Xi Jinping memperkenalkan proyek BRI dalam pidatonya di Universitas Nazarbayev Kazakhstan (President Xi Jinping Delivers Important Speech and Proposes to Build a Silk Road Economic Belt with Central Asian Countries, 2013). Pidato Xi di Kazakhstan tersebut merupakan langkah awal untuk membuka pintu pertama dari rute proyek BRI menuju Eropa melalui Asia Tengah. Kemudian dilanjutkan Xi dalam pidatonya pada Oktober 2013 di Indonesia untuk membuka jalur maritim proyek BRI (Xinhua, 2015). Pada tahun-tahun berikutnya Xi terus aktif mempromosikan proyek ambisius tersebut, untuk menunjukkan keseriusan Xi dalam implementasi proyek BRI diseluruh dunia.

Kepemimpinan Xi Jinping tengah mengejar pertumbuhan ekonomi dalam upaya memperkuat legitimasi kepemimpinannya. Bersamaan dengan hal tersebut Tiongkok memerlukan sarana pendukung lainnya untuk mencapai target tersebut yaitu dengan memperluas pengaruhnya didunia internasional, dengan memperkuat integrasi ekonomi, aktif dalam dialog global, memperkuat sistem pertahanan, dan ikut serta dalam agenda-agenda internasional. Bersamaan dengan proyek ambisius Tiongkok tersebut, perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam merespon beberapa isu-isu global menjadi pertanda keaktifan Tiongkok dalam melindungi

rute proyek BRI di beberapa kawasan dunia. Aktivitas ini telah menandakan peningkatan keterlibatan Tiongkok dalam beberapa konflik besar di dunia. Seperti laporan *Mercator Institute for China Studies* (MERICS) bahwa di negara-negara *Middle East and North Africa* (MENA), keterlibatan Tiongkok dalam upaya penyelesaian di negara-negara tersebut meningkat (Legarda, 2018). Negara-negara tersebut merupakan rute proyek BRI. Keterlibatan Tiongkok di negara-negara tersebut juga ditandai setelah proyek BRI diluncurkan, hal tersebut menjadi indikator kepentingan Tiongkok untuk melindungi proyek BRI tersebut.

Untuk mengetahui keterlibatan Tiongkok dalam dunia internasional lebih dalam lagi, dapat dilihat dari keterlibatan negara tersebut di suatu kawasan tertentu seperti halnya keterlibatan Tiongkok di kawasan Timur Tengah. Salah satunya adalah keterlibatan Tiongkok di dalam konflik Suriah. Konflik Suriah merupakan efek domino dari fenomena *Arab Spring*, sebuah peristiwa jatuhnya rezim-rezim otoriter Arab, dan menjadi titik awal munculnya proses demokrasi di negara-negara Arab (Hadi, Setiawati, & Cipto, 2015). Gelombang demonstrasi yang terjadi di Tunisia telah mempengaruhi masyarakat Suriah untuk melakukan demonstrasi yang sama dalam rangka menuntut perubahan politik yang telah berjalan secara otokrasi (Hasan, 2019). Konflik Suriah tersebut telah mendatangkan pihak-pihak dengan berbagai macam kepentingan, dimana hal tersebut membuat situasi konflik menjadi semakin parah, diantaranya telah merubah demonstrasi damai menjadi konflik bersenjata. Amerika Serikat dan Rusia merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung dalam penyediaan kebutuhan senjata dalam konflik Suriah. Menurut laporan *The Syrian Observatory for Human Rights* (SOHR), diperkirakan sejak konflik dimulai korban tewas telah mencapai 511.000 jiwa. Konflik yang bermula

dari aksi demonstrasi kepentingan lokal berubah menjadi kepentingan regional dan juga internasional. Pada akhirnya konflik menjadi semakin membingungkan dengan banyaknya kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya yang membuat keadaan menjadi semakin paran dan menjadikannya sebagai konflik multilateral yang kompleks. Kondisi tersebut melatarbelakangi sebagai awal upaya Tiongkok untuk menjadi aktor mediator di dalam konflik Suriah, hal ini dapat dipahami bahwa Tiongkok telah memiliki kedekatan sejarah dengan Suriah yang berlangsung sejak lama. Suriah adalah salah satu negara yang mendukung rancangan resolusi untuk mengembalikan kursi Tiongkok di Dewan Keamanan PBB Dalam Majelis Umum ke-26 dan merupakan bagian dari Jalur Sutera Tiongkok kuno (Zreik, 2019).

Pada Januari 2014 Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyampaikan lima posisi Tiongkok di konflik Suriah dalam pembukaan Geneva 2 yaitu; resolusi politik; tidak ada intervensi dari luar; inklusivitas dalam proses transisi dan rekonsiliasi nasional; persatuan; dan komitmen dalam memberikan bantuan kemanusiaan (Labate, 2014). Ketidakstabilan kawasan Timur Tengah yang diakibatkan oleh konflik Suriah menjadi latar belakang keterlibatan Tiongkok di dalam konflik tersebut. Oleh karena itu menarik untuk menganalisa lebih dalam bagaimana peran Tiongkok di konflik Suriah. Tujuan riset ini untuk mengetahui peran Tiongkok dalam konflik suriah dengan menggunakan teori *quasi mediation*. Teori *quasi mediation* merupakan salah satu dari sedikit teori baru, yang disusun secara khusus untuk menganalisa bagaimana peranan Tiongkok di Timur Tengah. Teori ini berguna untuk menjelaskan peran Tiongkok di konflik Suriah khususnya mengidentifikasi pola keterlibatan Tiongkok dalam konflik tersebut. Hal ini juga

penting untuk mengetahui peran Tiongkok di kawasan Timur Tengah dan dunia global secara umum.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Mengapa Tiongkok menggunakan *quasi mediation* dalam konflik Suriah pada tahun 2011-2019?

I.3 TUJUAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan konflik Suriah di Timur Tengah
2. Untuk mengidentifikasi pola keterlibatan Tiongkok dalam konflik Suriah
3. Untuk mengetahui alasan mengapa Tiongkok menggunakan *quasi mediation* dalam konflik Suriah

I.4 SIGNIFIKANSI

Pembahasan mengenai konflik Suriah merupakan isu kontemporer dalam studi Hubungan Internasional. Sebagaimana diketahui bahwa dampak dari konflik tersebut telah menewaskan hampir 600.000 jiwa dan melibatkan berbagai aktor internasional. Sehingga peneliti menganggap penting untuk melihat bagaimana peran Tiongkok, sebagai salah satu aktor internasional yang cukup diperhitungkan dalam konflik tersebut. Kemudian penting melihat bagaimana kebijakan dan diplomasi Tiongkok terhadap Suriah dengan tidak ikut campur (menjadi *leader*) ketika Suriah membuat kebijakan, melainkan lebih condong untuk menjaga

hubungan karena kepentingan ekonomi dan keamanan. Sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana sikap Tiongkok di Suriah. Namun sebagian penelitian kurang menyoroti secara detail pola kebijakan Tiongkok di Suriah. Maka dari itu peneliti mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda mengenai kebijakan Tiongkok di Suriah, yaitu dengan menggunakan teori *quasi mediation* yang dapat menganalisa lebih dalam bentuk keterlibatan Tiongkok di Suriah dan alasan mengapa Tiongkok menggunakan pola tersebut.

I.5 LINGKUP PENELITIAN

Dalam penelitian ini studi kasus yang akan dibahas oleh penulis antara lain adalah kebijakan Tiongkok di konflik Suriah pada tahun 2011-2019. Alasan memilih periode ini antara lain adalah karena keaktifan peran Tiongkok Tiongkok dalam konflik Suriah sudah bermula sejak konflik tersebut meletus pada tahun 2011 dan peran tersebut semakin kuat pada tahun-tahun berikutnya.

I.6 KAJIAN PUSTAKA

Pembahasan mengenai konflik Suriah dibahas dalam tulisan *The Diplomatic Dimensions of the Syrian Conflict*. Tulisan tersebut melihat bagaimana konflik di Suriah melalui dimensi diplomatik, dan melihat adanya kepentingan dari negara-negara besar dunia seperti Russia dan AS. Konflik Suriah telah membagi kelompok-kelompok tersebut menjadi tiga bagian yaitu, kelompok non Barat yang terdiri dari Tiongkok, Russia, dan Iran yang memberi dukungan terhadap rezim, selanjutnya adalah kelompok Barat yang terdiri dari AS, Perancis, Inggris, dan negara barat lainnya yang memberi dukungan terhadap pihak oposisi, serta

kelompok yang netral yaitu Israel dan Palestina. Dinamika diplomasi Russia dan AS dalam konflik kepentingan di Suriah, dipercaya telah merusak diplomasi sebagai cara penyelesaian perang dengan cara damai, seperti yang dilakukan Dewan Keamanan PBB tentang keputusan konsensual untuk menyelesaikan konflik Suriah. Akibatnya upaya yang dilakukan gagal mencapai jalan diplomatik, dan membuat pro rezim dan oposisi menerima bantuan militer dari pihak luar yang menjadi penciptaan perang sipil di Suriah (Olenrewaju & Joshua, 2015).

Kemudian kajian mengenai konflik Suriah juga dapat ditemukan dalam artikel yang berjudul *An Overview of the Conflict in Syria*, yang secara garis besar melihat bahwa konflik Suriah tidak akan selesai dengan lengsernya rezim Bashar Al-Assad. Karena itu tidak akan menyelesaikan semua permasalahan di Suriah, dan justru akan membawa Suriah pada eskalasi militer yang akan menyebabkan perang yang lebih serius dan membawa bencana besar terhadap negara-negara tetangga, seperti Yordania, Irak, Turki, dan negara-negara Teluk. Hal tersebut karena, saat ini konflik Suriah telah menyebabkan multilateral konflik yang secara bersamaan menimbulkan kelompok-kelompok kepentingan baru yang ingin menguasai Suriah. Artikel tersebut melihat bahwa akibat konflik Suriah kelompok pro rezim akan melakukan aksi balas dendam kepada pihak oposisi. Kekhawatiran pihak oposisi adalah bagaimana mereka dapat bertahan hidup, hanya ada dua pilihan yaitu dengan menunggu mundurnya Bashar Al-Assad atau membunuhnya. Karena tidak memungkinkan bagi pihak oposisi dapat hidup normal kembali seperti sebelumnya, atas aksi yang mereka lakukan melawan rezim Bashar Al-Assad. Penulis mengakhiri argumen dengan mengatakan bahwa konflik Suriah telah menjadi

konflik yang permanen, karena tidak memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk keluar dari konflik (Albasoos, 2017).

Secara keseluruhan tulisan diatas membahas mengenai konflik Suriah, khususnya melihat bagaimana faktor eksternal sebagai salah satu penyebab pecahnya konflik Suriah. Namun belum banyak membahas secara khusus bagaimana peranan Tiongkok dalam konflik Suriah. Padahal, Tiongkok memiliki posisi yang cukup penting dan unik dalam konflik Suriah karena Tiongkok merupakan aktor yang aktif dalam melakukan diplomasi langsung terhadap kedua belah pihak yang bertikai, tanpa memihak atau melakukan intervensi di konflik Suriah. Untuk itu penelitian ini berusaha mengisi kekosongan dengan menganalisa secara dalam peran Tiongkok di konflik Suriah.

Tulisan *Russia's Resurgence in Syria: A New Cold War?*, membahas tentang peran *major power* di konflik Suriah. Russia dan AS dalam konflik Suriah merupakan aktor utama. Bantuan militer yang diberikan kepada pihak pemerintah dan pihak oposisi dalam konflik Suriah telah membawa kedua aktor tersebut ikut campur secara langsung dan mengakibatkan intervensi langsung oleh aktor-aktor internasional lainnya. Russia adalah kekuatan besar di Timur Tengah karena satu-satunya negara besar yang memiliki pangkalan militer di Timur Tengah. Baik AS dan Russia saat ini sedang melakukan perang dingin di Timur Tengah untuk dapat mempertahankan kekuatan dan pengaruhnya melalui aliansi-aliansinya. Penyelesaian konflik dengan perang di Suriah diartikan sebagai kegagalan Liga Arab dan PBB dalam menyelesaikan konflik dengan cara damai (Sadek, 2016).

Artikel yang berjudul *Competing Interests of Major Powers in the Middle East: The Case Study of Syria and Its Implications for Regional Stability* membahas

mengenai kompetisi kekuatan-kekuatan besar di Timur Tengah dengan melihat studi kasus di Suriah. Melihat bahwa lokasi Timur Tengah yang strategis serta kekayaan energi yang dimiliki telah menarik perhatian pihak luar sejak dahulu, untuk ikut serta dalam penyelesaian permasalahan di Timur Tengah. Salman berargumen bahwa keterlibatan pihak luar seperti AS, Russia, dan Tiongkok telah memperparah konflik Suriah. AS lebih condong untuk menyebarkan ideologi demokrasinya dan berusaha menumbangkan rezim Bashar Al-Assad, Tiongkok memiliki pengaruh yang masih terus berkembang di Suriah, sedangkan Russia memiliki minat untuk mempertahankan pangkalan militernya di negara tersebut. Aktor internasional terlihat lebih condong mengarah pada memanfaatkan persaingan regional untuk meraih kepentingan-kepentingan di Timur Tengah (Zulfqar, 2018).

Tulisan diatas memperlihatkan bagaimana peranan negara-negara *major power* dalam konflik Suriah. Aktor dominan dalam konflik Suriah yang telah ditelaah adalah AS, melihat bagaimana serangkaian kebijakan dan intervensi militer yang dilakukan AS. Aktor internasional lain adalah Rusia yang memiliki posisi penting di Suriah, dengan pangkalan militer satu-satunya di Timur Tengah berada di Suriah. Meskipun peran Rusia dan AS di konflik Suriah sudah dibahas dalam tulisan tersebut, namun masih sedikit tulisan yang menganalisa peran Tiongkok di konflik Suriah. Sama halnya dengan artikel berjudul *China's Foreign Policy in the Middle East* yang menyebutkan bahwa peran Tiongkok di Timur Tengah telah menjadi kekuatan ekonomi global utama dalam sektor ekonomi mengalahkan AS. Dijelaskan pula bahwa Tiongkok juga merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia, membuat ketergantungan Tiongkok terhadap energi dan sumber daya

minyak tidak dapat dihindari. Dalam mempertahankan posisi ekonominya Tiongkok terlibat langsung dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah yang memiliki pasokan energi dan minyak terbesar di dunia. Meskipun demikian Tiongkok tidak ingin membangun kerjasama multilateral dengan kawasan Timur Tengah. Melainkan melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara di Timur Tengah. Ambisi terbesar Tiongkok di Timur Tengah adalah ekonomi, dengan menjanjikan pembangunan secara menyeluruh tanpa adanya gejolak sosial atau tindakan intervensi. Berbeda dengan AS yang melakukan pembangunan internasional dengan cara mendikte negara-negara tersebut (Umbreen & Waheed, 2016). Namun tulisan ini belum membahas peran Tiongkok dalam konflik Suriah secara mendalam dan faktor yang mempengaruhi peran tersebut.

Artikel yang berjudul *The Political Economy of the Sino-Middle Eastern Relations* juga melihat bagaimana hubungan ekonomi Tiongkok dengan Timur Tengah. Namun ia beranggapan bahwa hubungan tersebut hanya sebatas menjaga keamanan kebutuhan energi dan penjualan senjata. Tiongkok tidak bertujuan untuk merusak kepentingan AS di wilayah tersebut. Kerjasama antara Tiongkok dan Timur Tengah didasari oleh kepentingan bersama, sekaligus membawa keuntungan bagi Timur Tengah, dimana Tiongkok menjadi konsumen stabil hasil energi dan minyak Timur Tengah. Sejak berkurangnya peran AS di Timur Tengah, Tiongkok menjadi aktor yang mengambil peranan penting terhadap negara-negara di Timur Tengah (Olimat, 2010). Namun penelitian ini belum membahas secara mendalam peran Tiongkok dalam konflik-konflik yang ada di Timur Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada literatur-literatur berkaitan dengan

kebijakan Tiongkok di Timur Tengah dengan melihat keterlibatannya di salah satu konflik paling besar di kawasan.

Berdasarkan tiga kelompok penelitian diatas yaitu terkait konflik Suriah, peran negara-negara *major power* di konflik Suriah, dan terkait peran Tiongkok di Timur Tengah, dapat dilihat bahwa belum banyak yang membahas secara detail tentang bagaimana peranan Tiongkok di konflik Suriah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran Tiongkok di konflik Suriah melalui perspektif *quasi mediation*. Hal ini penting karena tidak hanya dapat memberikan gambaran peran Tiongkok dalam konflik Suriah kedepannya namun juga peran Tiongkok di Timur Tengah secara umum.

I.7 KERANGKA KONSEP

Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah, penulis akan menggunakan teori *quasi mediation*. Teori *quasi mediation* merupakan teori yang disusun oleh Degang Sun, yang merupakan seorang pakar peran Tiongkok di Timur Tengah, dan Yahia Zoubir, yang merupakan ahli di bidang geopolitik. Diplomasi *quasi mediation* mengacu pada peran suatu negara dalam aktivitas internasional untuk mempertahankan kepentingan komersial, politik dan diplomatiknya. Dalam menerapkan konsep mediasi *quasi mediation* yang digagas oleh Sun dan Zoubir, keduanya melihat bahwa selama ini standar dalam penerapan konsep mediasi hanya dilakukan oleh negara-negara maju. Sehingga Sun dan Zoubir berusaha membuktikan adanya proses mediasi unik yang juga dilakukan oleh negara berkembang seperti Tiongkok dengan menggunakan konsep mediasi *quasi mediation* (Sun & Zoubir, 2018).

Untuk mempermudah memahami perbedaan antara diplomasi mediasi umum dan *quasi mediation* maka penulis perlu menjelaskan perbedaan yang dimiliki keduanya. *Pertama*; diplomasi *quasi mediation* bertujuan untuk membela kepentingan komersial, politik, dan diplomatik mediator berbeda dengan mediasi umum dalam upaya mencapai kepentingan keamanan dan strategis. *Kedua*; aktor mediator dalam mediasi umum memberikan sikap lebih aktif dalam keterlibatannya di penyelesaian konflik, dimana aktor mediator cenderung terlibat dalam semua upaya penyelesaian konflik. Berbeda dengan mediasi *quasi mediation*, aktor mediator lebih selektif dalam keterlibatannya di penyelesaian konflik, hal ini mengacu pada kemampuan aktor mediator untuk meminimalisir kegagalan dalam penyelesaian konflik. *Ketiga*; dalam mediasi *quasi mediation* aktor mediator lebih memilih untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik daripada mendominasi. *Keempat*; dalam mediasi *quasi mediation* peran aktor mediator adalah mengikuti jalannya proses penyelesaian konflik, berbeda dengan mediasi umum yang berupaya untuk memimpin penyelesaian konflik. *Kelima*; dalam proses penyelesaian konflik, mediasi *quasi mediation* cenderung untuk ikut serta dalam merevisi hasil kesepakatan dan mengemukakan ide-ide konstruktif. Berbeda dengan mediasi umum dalam proses penyelesaian konflik, mediasi ini berusaha untuk mempengaruhi hasil kesepakatan. *Keenam*; komitmen aktor mediator dalam mediasi *quasi mediation* lebih sedikit dibandingkan dengan mediasi umum. *Ketujuh*; mediasi *quasi mediation* mendorong pengurangan dampak konflik sebagai lawan dari resolusi konflik oleh mediasi umum.

**Tabel 1.1 Perbedaan Diplomasi *Quasi Mediation* dan Diplomasi
Mediasi Umum**

| | Mediasi Umum | <i>Quasi-Mediation</i> |
|--|--|---|
| Keterlibatan kepentingan mediator | Kepentingan Keamanan dan kepentingan strategis | Kepentingan komersial, politik dan diplomatik |
| Sikap mediator | Pro-aktif | Selektif berdasarkan kasus-perkasus |
| Posisi mediator | Mediator berperan 'mendominasi' | Mediator memiliki posisi untuk 'berpartisipasi' dalam mediasi |
| Peran mediator | Mediator berperan dengan 'memimpin' proses mediasi | Mediator berperan dengan 'mengikuti' proses mediasi |
| Proses mediasi | Mediator berperan mempengaruhi hasil kesepakatan | Mediator berperan merevisi hasil kesepakatan |
| Komitmen mediator untuk mengerahkan sumber daya | Mediator mengerahkan sumber daya utamanya | Mediator mengerahkan sumber daya rendah dan memiliki komitmen yang rendah |
| Tujuan Mediator | Mencapai resolusi konflik | Tujuan de-eskalasi konflik |

Diplomasi *quasi mediation* memiliki empat level kategori diplomasi yaitu:

- *Multifaceted Intervention*

Multifaceted intervention adalah intervensi beragam segi yaitu mengacu pada bagaimana Tiongkok menggunakan sumber daya

diplomatik. Disini, proses intervensinya mengacu pada agenda negosiasi dengan cara mengirim utusan khusus untuk menangani perselisihan secara langsung. Tujuan dari proses ini adalah untuk mempengaruhi hasil negosiasi kedua belah pihak. Biasanya dalam melakukan proses negosiasi di level ini, Tiongkok tetap mempertahankan hubungan terhadap semua pihak, baik pihak yang bertikai maupun komunitas internasional yang melakukan upaya yang sama. Proses mediasi di level ini melibatkan para pembuat kebijakan terkemuka termasuk Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri dari negara yang bertikai. Proses negosiasi pada level ini bertujuan untuk menghindari perang. Kemungkinan yang akan dicapai pada level ini adalah mencegah krisis yang terjadi meningkat dan memperburuk keadaan.

Dalam manajemen konflik, Tiongkok sering mendekati pihak-pihak yang bertikai dengan dorongan dan bantuan. Upaya dalam level ini menggunakan istilah mirip dengan taktik 'wortel dan tongkat', dimana Tiongkok memberikan kepada kedua pihak bantuan ekonomi yang diperlukan, kebijakan perdagangan yang condong menguntungkan mereka, pengurangan tarif impor komoditas, mengundang para pemimpin semua pihak untuk mengunjungi Tiongkok, dan memberikan bantuan militer untuk membantu mencapai kesepakatan antara pihak yang bertikai. Di sisi lain bila perlu, Tiongkok memberikan pengaruh melalui bantuan dengan pemotongan ekonomi. Upaya tersebut dilakukan agar pihak-pihak yang bertikai meningkatkan suhu konflik dan meredam konflik dengan cara yang damai. Apabila kedua belah pihak tidak dapat berdamai maka Tiongkok tidak akan melakukan tindakan yang proaktif.

- *Proactive Involvement*

Proactive involvement adalah upaya Tiongkok menggunakan cara proaktif diplomatik. Yaitu upaya ini dilakukan langsung oleh pemimpin Tiongkok yang menjadi perantara sengketa. Berbeda dengan level sebelumnya yang dilakukan dengan cara intervensi multi-aspek, cara ini langsung dilakukan oleh masing-masing kepala negara yang bersangkutan. Dalam proses negosiasi tersebut, Tiongkok tidak menggunakan cara yang mengintervensi secara langsung melainkan menggunakan berbagai macam cara seperti; pertama, menjadi pemimpin negosiasi atau pembuat keputusan; kedua, tidak menetapkan agenda; ketiga, memberi bantuan ekonomi; dan keempat, tidak memberikan tekanan politik untuk mempengaruhi hasil diskusi. Dalam level ini Tiongkok berupaya mendukung resolusi konflik dan mempercepat proses resolusi konflik dengan harapan hasil jangka pendek, agar konflik dapat segera diselesaikan. Tiongkok berusaha menjaga kebijakan berimbang dari proses tersebut.

- *Limited Intercession*

Limited intercession merupakan penengah terbatas yang merujuk pada jenis mediasi pada level rendah dimana upaya diplomatik yang dilakukan Tiongkok berupa diplomatik tidak penting (diplomasi basa-basi). Karena dalam diplomasi level ini Tiongkok berpartisipasi secara ringan dan melakukannya semata-mata untuk menandai kehadirannya ditengah-tengah konflik tersebut. Biasanya diplomasi ini dilakukan ketika isu-isu tersebut merupakan kepentingan sekunder dari Tiongkok. Sehingga dampak dari peran diplomasi itu tidak signifikan dan pihak yang bertikai tidak menerima

pengaruh yang berarti dari Tiongkok, dan solusi damai jangka pendek yang dihasilkan dari diplomasi tersebut rendah. Tiongkok dalam menyelesaikan kasus dengan mengirim utusan diplomasi sementara satu persatu sesuai kasus.

- *Indirect Participation*

Indirect participation adalah partisipasi tidak langsung yaitu Tiongkok tidak mengambil tindakan secara proaktif, tetapi berpartisipasi secara tidak langsung dalam manajemen konflik yang diinisiasi oleh organisasi internasional. Seperti penyelesaian sengketa atau konflik melalui PBB. Biasanya Tiongkok melakukan diplomasi level ini karena memiliki sedikit kepercayaan satu sama lain antar pihak yang bertikai. Tiongkok tidak berbuat banyak untuk mempengaruhi kedua pihak. Baik pihak yang bertikai maupun organisasi internasional.

Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisa level keterlibatan Tiongkok dalam konflik Suriah dari empat level diatas. Namun tidak hanya itu, peneliti juga akan menelaah faktor pendorong yang menyebabkan Tiongkok berada pada level tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam menjelaskan empat level keterlibatan di atas, teori ini juga memberikan penjelasan terkait faktor pendorong Tiongkok menggunakan *quasi mediation*. Faktor pendorong tersebut dapat dibagi menjadi empat yaitu:

1. Relevan Dengan Kepentingan Komersial

Keterlibatan Tiongkok di dalam kawasan konflik dipengaruhi oleh potensi ekonomi yang dimiliki oleh Tiongkok. Di dalam argumen ini semakin besar kepentingan komersial Tiongkok di suatu kawasan, maka potensi Tiongkok untuk terlibat di dalam konflik tersebut juga semakin besar. Di dalam artikel yang ditulis oleh Sun dan Zoubir menyinggung keterlibatan Tiongkok di suatu kawasan disebabkan oleh beberapa hal yaitu; pertama, pengamanan jalur perdagangan energi dan memastikan stabilitas harga kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kedua, menjaga stabilitas keamanan kawasan untuk memastikan tidak adanya ketidakstabilan kawasan yang disebabkan oleh monopoli sumber daya alam di kawasan oleh aktor lain atau kekuasaan kelompok militan bersenjata. Ketiga, untuk melakukan serangkaian langkah diplomatik guna menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan yang berpotensi mengancam keamanan investasi Tiongkok. Kepentingan komersial merupakan kepentingan terpenting Tiongkok melihat perkembangan pesat ekonomi dan tuntutan modernisasi Tiongkok.

2. Jangkauan Pengaruh Tiongkok

Di dalam poin ini menjelaskan bagaimana hubungan Tiongkok dengan pihak-pihak yang berkonflik. Semakin besar kemungkinan Tiongkok memberikan pengaruhnya dalam sebuah konflik maka semakin besar kemungkinan Tiongkok akan terlibat. Langkah diplomasi mediasi yang dilakukan pada umumnya memerlukan keinginan dan sumberdaya yang besar dalam mendorong pengaruhnya kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Seperti yang dilakukan oleh Presiden AS ke-39 Jimmy Carter

terhadap proses damai antara Israel dan Mesir, dimana AS memberikan komitmen untuk memberikan bantuan ekonomi dan keamanan kepada keduanya. Namun hal tersebut diragukan akan dilakukan oleh Tiongkok, mengingat Tiongkok enggan memberikan dana cuma-cuma kepada pihak yang berkonflik. Bahkan dalam beberapa pernyataan Tiongkok mengatakan bahwa mereka mengakui tidak mampu untuk memberikan sumber dayanya secara signifikan di dalam konflik MENA. Maka dari hal tersebut peran Tiongkok dalam suatu konflik akan mempertimbangkan potensi kerjasama yang dapat dilaksanakan dengan kedua pihak yang berseteru dengan tujuan untuk meminimalisir pengeluaran sumberdaya bantuan yang dibutuhkan.

3. Konsensus Kekuatan Besar Dunia

Di bagian penjelasan faktor ini disebutkan bahwa keterlibatan Tiongkok di dalam suatu konflik akan melihat keterlibatan aktor-aktor negara yang memiliki kekuatan besar di dalam konflik tersebut. Yaitu semakin besar aktor-aktor kekuatan besar yang terlibat di dalam konflik tersebut maka keterlibatan Tiongkok menggunakan diplomasi *quasi mediation* juga akan semakin besar. Keputusan Tiongkok untuk tidak secara aktif bermain peran di konflik tersebut tidak hanya disebabkan karena tidak adanya kepentingan ekonomi Tiongkok di dalam konflik tersebut. Melainkan juga karena ketidakmampuan aktor-aktor tersebut dalam menyelesaikan konflik tersebut. Karena dampak yang akan ditimbulkan ketika Tiongkok memainkan peran aktif di dalam konflik yang telah gagal diselesaikan akan berdampak memperburuk citra Tiongkok di masyarakat internasional.

Tiongkok mendapat desakan dari masyarakat internasional untuk berkontribusi di dalam proses perdamaian dunia karena Tiongkok merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut merupakan faktor yang mendorong Tiongkok untuk berperan di dalam suatu konflik. Yaitu untuk menyebarkan pengaruhnya sebagai salah satu negara anggota tetap PBB. Sehingga upaya yang dilakukan Tiongkok dalam suatu konflik adalah menunjukkan keperdulianya di dalam isu kemanusiaan meskipun kepentingan ekonomi di dalam permasalahan tersebut hanya sedikit. Seperti pada konflik Israel-Palestina, upaya yang dilakukan Tiongkok dalam konflik tersebut untuk memastikan bahwa Tiongkok ikut terlibat dalam upaya menjaga perdamaian dunia.

4. Tingkat Kesulitan Dalam Penyelesaian Konflik

Pada faktor terakhir yang menjadi pendorong Tiongkok untuk terlibat di dalam suatu konflik adalah tingkat kesulitan di dalam konflik tersebut. Apabila suatu konflik semakin mudah diselesaikan maka keterlibatan Tiongkok dalam konflik tersebut juga akan semakin besar. Pada tahap ini melihat peran Tiongkok dalam suatu konflik akan mempertimbangkan keputusan para pemangku kebijakan terhadap taraf kesulitan suatu konflik. Dapat dikatakan bahwa upaya diplomatik yang akan dilakukan Tiongkok untuk mengirimkan utusan khususnya dipengaruhi oleh tingkat kesulitan penyelesaian konflik tersebut. Semakin mudah tercapainya resolusi dari konflik tersebut maka akan semakin besar kemungkinan Tiongkok terlibat dalam konflik tersebut.

Tiongkok memiliki perbedaan mediasi bila dibandingkan dengan aktor negara-negara *major power* seperti Rusia dan AS di konflik Suriah dalam melakukan mediasi. Dimana Rusia dan AS lebih condong menggunakan peranan mediasi umum, sementara Tiongkok menggunakan *quasi mediation*. Tiongkok melakukan *quasi mediation* dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan dari kebijakannya tanpa terlibat terlalu jauh. Kepentingan yang terdapat dalam *quasi mediation* lebih menitik beratkan kepada aktor ketiga dibandingkan dua aktor yang berselisih. Bagaimana Tiongkok dapat merekonsiliasi kebijakan *quasi mediation* diplomatiknya dengan prinsip non-intervensi yang telah lama ada. Untuk menganalisis konflik di Suriah penelitian ini akan menggunakan pendekatan yaitu *multifaceted intervention*, khususnya melihat bagaimana Tiongkok mengeluarkan kebijakan diplomasinya untuk berpartisipasi menyelesaikan konflik di Suriah. Tidak hanya itu, peneliti juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong apa saja yang mendorong Tiongkok berperan secara *multifaceted* di dalam konflik tersebut.

I.8 METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian, penulis akan menggunakan metode kualitatif. Karena sifat data dari penelitian ini adalah ilmu sosial politik yang mendasarkan pengetahuannya pada dinamika interaksi sosial. Dimana interaksi sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dihitung sehingga penggunaan metode kualitatif dapat memenuhi kriteria dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Penulis akan menggunakan data-data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang didapat dari hasil laporan langsung terhadap lembaga pemerintah atau instansi terkait dari

laporan dan kebijakan Tiongkok di konflik Suriah atau instansi lainnya. Kemudian data sekunder yaitu data yang didapat dari jurnal-jurnal, berita, dan badan-badan peneliti terhadap studi kasus yang akan dikupas dalam menjawab rumusan masalah.

I.9 PROSES PENELITIAN

Proses penelitian adalah suatu tahapan yang menyangkut perencanaan atau langkah dalam melakukan riset, dimulai dari pra riset sampai laporan penelitian. Proses ini dianggap sangat penting karena sebagai acuan penulisan dalam melakukan penelitian. Sehingga penulis harus mengikuti seluruh rangkaian proses agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal. Adapun prosedur yang digunakan dalam riset ini adalah:

1. Pra Riset

Pra Riset merupakan kegiatan yang dilakukan untuk persiapan riset. Yaitu melihat hasil laporan terkait penelitian, dan membaca bacaan sesuai penelitian.

2. Pengambilan Data

Dalam pengambilan data dalam riset ini, maka akan menggunakan data-data sekunder sebagai data pendukung riset ini. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang berasal dari media tertulis, mencakup: majalah berkala, buku teks akademis, pernyataan resmi dari kebijakan Tiongkok, dan surat kabar harian. Sumber-sumber tersebut dipilih karena memiliki reputasi dan kredibilitas media / penerbit dan hubungannya dengan topik dari riset.

3. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya adalah menganalisis data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data diambil dari analisis data dalam rancangan riset kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

a. Mengorganisir dan menyiapkan data

Langkah pertama ini berfokus pada mengumpulkan semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber.

b. Membaca semua data

Untuk memahami data yang dikategorikan, semua data yang telah di dapat perlu untuk dibaca secara rinci dan menyeluruh. Proses ini memungkinkan untuk melakukan penyesuaian beberapa elemen data.

Saat membaca data, langkah pertama adalah membaca bahan bacaan dengan cepat. Tujuan dari proses ini adalah untuk memilih materi terkait dan mengidentifikasi pernyataan atau argumen terkait.

c. Pengkodean

Proses pengkodean melibatkan upaya pelabelan data tertentu yang dilakukan dalam riset. Kisaran kode dapat dikembangkan selama proses analisis.

d. Mengaitkan tema/deskripsi

Fase ini melibatkan proses penggambaran kategori dan tema. Kategori dan tema diidentifikasi selama proses pengkodean. Fase ini juga bertujuan untuk menemukan korelasi antara tema dan kategori.

e. Interpretasi arti

Tahap terakhir dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan yaitu menafsirkan makna dari data. Interpretasi adalah tindakan menjelaskan sesuatu, dalam hal ini adalah catatan terkait dokumen dan bahan bacaan.



BAB II

KONFLIK SURIAH DAN PERAN *MULTIFACETED* TIONGKOK

Setelah membangun kerangka berfikir pada bab sebelumnya melalui penjelasan pada latar belakang dan landasan teori, bab ini akan membahas mengenai peran Tiongkok dalam konflik Suriah dengan menggunakan diplomasi *quasi mediation*. Pada bagian pertama akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana situasi sebelum dan setelah konflik di Suriah terjadi. Kemudian bagian kedua akan mengelaborasi level *multifaceted intervention* di dalam diplomasi *quasi meditaion* yang digunakan Tiongkok dalam konflik Suriah. Kondisi kehidupan masyarakat Suriah sebelum terjadinya fenomena *Arab Spring* telah mengakibatkan luka mendalam bagi beberapa sekte di Suriah. Diketahui rasa kebencian tersebut menjadi pendorong utama keberanian masyarakat untuk melakukan perlawanan pada 2010. Konflik semakin rumit paska aktor-aktor lain muncul dalam penyelesaian konflik. Karena semua aktor memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam penyelesaian konflik di Suriah. Selain itu kekuatan internasional yang masuk kedalam medan konflik juga membawa kepentingan yang berbeda. Hadirnya dua kekuatan besar dunia yaitu Rusia dan AS dalam konflik tersebut telah menarik perhatian penulis untuk melihat keterlibatan Tiongkok di tengah-tengah dua kekuatan besar dalam konflik tersebut. Pada bab selanjutnya akan menganalisis motif yang mendukung Tiongkok untuk menggunakan pendekatan pada level *multifaceted intervention* dari diplomasi *quasi mediation* di konflik Suriah. Hal ini akan menjadi penting untuk dibahas karena juga akan berguna untuk mengetahui

faktor-faktor baru yang mendorong Tiongkok melakukan pendekatan menggunakan diplomasi tersebut di konflik Suriah.

II.1 Konflik Suriah

Untuk memahami konflik di Suriah bermula, seorang pakar Suriah Josef Olmert mengatakan bahwa *“its fundamental causes, as well as its course and possible implications are uniquely bound with the political development of the Syrian state from its very inception”* (Olmert, 2012). Seperti hubungan kelompok Alawit dan Sunni, sebelum 1963 hubungan keduanya dijahit dengan kebencian dan penghinaan, karena pada saat itu status sosial ekonomi Alawit rendah, dimana sering terjadi penghinaan terhadap kelompok Alawit oleh kelompok Sunni. Namun hal tersebut berbanding terbalik sejak 1971, Hafez al-Assad menjadi Presiden Suriah yang merupakan anggota Partai Ba’ath dari aliran Alawit. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Alawit meningkat dan memegang kekuasaan di Suriah, mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan dan bekerja sebagai dokter, professor, pengacara dan insinyur (Dam, 1996). Akibat dari kekuasaan partai Baath, prinsip-prinsip demokrasi mulai hilang di Suriah, menjadikan keluarga Assad satu-satunya pusat kehidupan politik di Suriah karena mereka telah menguasai politik, militer, dan perekonomian (Goulden, 2011). Untuk mempertahankan kekuasaannya, pada 1973 Hafez mengeluarkan kebijakan mengenai pemilihan Presiden yaitu “seorang Presiden harus berasal dari orang Islam”, namun masyarakat menolak kebijakan tersebut yang berdampak menjadi kerusuhan di Suriah (Baltes, 2016). Hal-hal tersebut terus menyebabkan gesekan antara masyarakat dengan pemerintahan Suriah.

Setelah Hafez meninggal, Bashar al-Assad ditunjuk sebagai penerus kepemimpinan di Suriah. Masyarakat Suriah semakin menderita karena ketidakadilan penegakkan hukum, korupsi meningkat, dan ketimpangan ekonomi terus meningkat, yang juga menyebabkan kemiskinan meningkat di Suriah. Masyarakat tidak lagi mendapatkan hak-hak mereka seperti akses untuk kehidupan politik, ekonomi, dan akses Pendidikan. Bahkan kebanyakan dari mereka tinggal di perumahan yang kumuh, seperti diketahui dalam beberapa laporan 42% masyarakat tinggal dengan kondisi yang tidak layak sebelum konflik Suriah terjadi (Rivlin, 2011). Diperburuk dengan kebijakan pemerintah yang tidak bermartabat kepada masyarakat Suriah, dan hak-hak asasi manusia sangat dikesampingkan. Hal ini sekaligus menjadi mesin otomatis pemupuk kebencian terhadap rezim pemerintah. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki keharmonisan sejak awal dengan rezim pemerintah.

Kondisi tersebut yang kemudian mendorong kebencian masyarakat untuk melakukan revolusi bersama dalam fenomena *Arab Spring* terhadap rezim Bashar al-Assad (Goulden, 2011). Pada awalnya masyarakat melakukan aksi demonstrasi damai sebagai efek fenomena *Arab Spring*, menuntut pemerintah yang korup dan brutal dan meminta hak-hak ekonomi dan politik serta penindasan terhadap hak-hak kebebasan masyarakat. Menurut Heiko Wimmen seorang peneliti dalam *Crisis Group* di Irak, Suriah, Lebanon mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan di Suriah bukan karena sektarianisme di masyarakat, melainkan penyatuan keluhan politik dan sosial (Wimmen, *Syria's Path From Civic Uprising to Civil War*, 2016). Hingga pada 2010, Bashar al-Assad dengan ceroboh menyulut perseteruan yang membuat Suriah terbakar ketika ia memberi wewenang kepada

pasukan keamanan di kota Dara selatan yang sebagian besar merupakan warga Sunni, untuk menggunakan senjata dalam mengamankan para demonstran yang melakukan demonstrasi secara damai. Pada waktu yang sama dengan aksi demonstrasi damai tersebut anak-anak di kota Deraa menulis sebuah kalimat di dinding sekolah mereka yaitu “menuntut jatuhnya rezim”. Atas kritikan tersebut Bashar Al-Assad kemudian memerintahkan Jendral Atef Najeeb untuk menangkap anak-anak tersebut, dan mereka disiksa dengan dipukuli, disetrum listrik, dan kuku-kuku mereka ditarik keluar (Hasan, 2019).

Aksi penangkapan tersebut memperburuk situasi di kota Deraa yang menyebabkan keresahan pada 15 Maret 2011. Keresahan tersebut semakin tidak terkendalikan ketika pada 23 Maret di Masjid Deraa Al-Omari, para demonstran ditembaki oleh tantara Bashar al-Assad yang menyebabkan 5 orang tewas pada hari itu. Tidak berhenti sampai disitu aksi kekerasan oleh militer Suriah terus meluas hingga pelayat di kota Douma juga ditembaki ketika hendak melayat korban demonstran yang meninggal sebelumnya. Memperparah kondisi Suriah pada 25 Maret, aksi tersebut telah menyebar keseluruh kota di Suriah, Daraa, Damaskus, Homs dan Banias (Albasoos, 2017). Hal itu berakibat pada eskalasi konflik di Suriah semakin besar, membuat berbagai kelompok-kelompok masyarakat bergabung untuk melawan pemerintah Suriah. Situasi tersebut tidak hanya melibatkan kelompok pemerintah dan oposisi melainkan juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain yang muncul untuk memperebutkan kekuasaan atas kondisi Suriah yang sedang tidak stabil. Seperti, Hizbullah, *Islamic state of Iraq and Syria* (ISIS), *kurdish people's protection units* (YPG), dan *free syrian army* (FSA), dimana kelompok-kelompok tersebut sebagian besar didukung oleh negara-

negara kekuatan besar dalam pasokan senjata. Hal tersebut membuat upaya solusi penyelesaian konflik semakin rumit dan menyebabkan konflik multilateral menjadi semakin kompleks.

Disinyalir intervensi kemanusiaan masyarakat internasional berasal dari data-data yang tersedia di sosial media internet. Kebebasan internet di Suriah telah memobilisasi kondisi politik jalanan yang mendukung kelompok oposisi untuk bersatu. Namun hal tersebut tidak seburuk dari dampak media sosial yang terjadi di Mesir. Karena jumlah pengguna internet di Suriah tidak lebih dari 20%, sementara itu di Mesir internet digunakan untuk memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan waktu dan taktik demonstrasi. Berbeda halnya dengan Suriah, yang hanya menggunakan internet sebagai alat untuk menentukan pelaksanaan shalat Jum'at dan pemakaman jenazah korban pembunuhan oleh pasukan militer Bashar al-Assad, serta menyiarkan apa yang terjadi di Suriah saat itu. Internet telah menjadi pusat informasi mengenai kondisi Suriah saat itu, menceritakan pelanggaran-pelanggaran HAM di Suriah secara nyata. Membuat pandangan internasional terhadap konflik Suriah sebagai kerusuhan yang mematikan, hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong negara-negara untuk melakukan intervensi langsung atas konflik Suriah (Tkacheva, et al., 2013).

Pada 4 oktober 2011 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi konflik Suriah (Council, 2011). Resolusi tersebut pertama kali dirancang oleh Perancis untuk menghentikan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Pemerintah Suriah. Resolusi tersebut diputuskan setelah lebih dari 2.000 orang tewas dalam beberapa bulan semenjak konflik tersebut dimulai pada Maret 2010. Namun tidak semua anggota PBB setuju dengan cara tersebut, Rusia dan Tiongkok

menggunakan hak vetonya untuk menghentikan upaya tersebut (Harris, 2012). Hal tersebut dilakukan karena, Rusia sangat menentang dominasi AS di Timur Tengah, mengingat belajar pada peran AS dalam konflik di Libya. Menurut Rusia penyelesaian konflik harus dilakukan oleh kedua kelompok melalui jalan damai tanpa melibatkan pihak lain (Mohammed & Al-Khalidi, 2013). Upaya lain telah dilakukan oleh AS, diantaranya adalah tuntutan oleh AS, Presiden Barack Obama menuntut agar Presiden Bashar al-Assad untuk segera turun dari jabatannya atas akibat dari perbuatannya, namun Presiden Bashar al-Assad tetap percaya diri dengan adanya dukungan yang diberikan Rusia (Gamboa, 2013). Rusia telah mengirimkan rudal anti-kapal selam, rudal S-300, amunisi lainnya pada 2013 untuk mencegah masuknya barat dari zona larangan terbang. Dalam rangka menyeimbangkan konflik di kawasan tersebut, AS kemudian mempersenjatai kelompok-kelompok oposisi namun upaya ini tidak bertahan lama (Gamboa, 2013). Rusia menggunakan hak vetonya bukan semata-mata karena keterikatan ekonomi ataupun militer. Melainkan langkah tersebut diambil untuk melindungi Suriah melawan kelompok islam radikal (teroris). Karena Suriah merupakan benteng pertahanan melawan kelompok teroris bagi Rusia. Hal tersebut juga membawa keuntungan bagi Rusia, dimana Suriah menjadi zona militer Rusia, kedua kebijakan Suriah menjadi lebih dekat dengan langkah-langkah yang diambil Rusia. Disamping itu peran AS terlihat membingungkan dalam menentukan posisinya di konflik Suriah. Setelah terpilihnya Presiden Donald Trump dalam pemilu AS, sikap AS di dalam konflik Suriah semakin agresif. Pada tahun pertamanya Trump mengambil sikap untuk melawan kelompok ISIS dalam konflik tersebut, namun secara bersamaan Trump berjanji untuk menarik diri dari konflik Suriah.

Upaya untuk membantu penyelesaian konflik Suriah tidak hanya melibatkan negara-negara kekuatan besar, namun juga negara-negara Teluk, Iran, Turki, dan Israel (Borger, 2018). Konflik tersebut telah menyebabkan kekacauan kawasan di Timur Tengah dan mengancam kepentingan Tiongkok di kawasan tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan Tiongkok untuk memastikan kestabilan di Suriah untuk mencapai kepentingan ekonominya adalah dengan juga terlibat langsung di dalam konflik tersebut. Keterlibatan Tiongkok di kawasan MENA telah dijelaskan secara umum oleh Sun dan Zoubir menggunakan empat pendekatan diplomasi, yaitu; *multifaceted intervention*, *proactive involvement*, *limited intercession*, dan *indirect participation*. Namun Sun dan Zoubir belum secara spesifik menjelaskan peran Tiongkok di konflik Suriah berada di pendekatan yang mana. Sehingga bagian selanjutnya akan menjelaskan posisi diplomasi yang dipilih Tiongkok dari keempat pendekatan tersebut.

II.2 Kebijakan Tiongkok Dalam Konflik Suriah: *Multifaceted Intervention*

Jika dilihat dari teori *quasi mediation* keterlibatan Tiongkok di konflik Suriah dapat dikategorikan sebagai *multifaceted intervention*. Dalam melakukan diplomasi *multifaceted intervention* dalam artikel yang ditulis oleh Sun dan Zoubir, diplomasi Tiongkok di dalam konflik MENA memiliki beberapa karakteristik yaitu pertama; mengirimkan utusan diplomatik khusus, kedua; pemerintah Tiongkok mendorong kepada pihak yang bertikai untuk merancang proses negosiasi agar mencapai kesepakatan dalam waktu singkat, dan ketiga; memberi bantuan khusus seperti bantuan ekonomi, bantuan kemanusiaan dan bantuan militer agar keduanya mencapai kesepakatan dalam waktu yang singkat. Penjelasan dibawah ini

selanjutnya akan membuktikan beberapa karakteristik yang sama seperti yang dilakukan Tiongkok di MENA di dalam diplomasi Tiongkok dikonflik Suriah.

Hubungan antara Tiongkok dan Suriah sebelum terjadinya konflik Suriah dapat dikatakan tidak memiliki hubungan diplomatik yang khusus antara keduanya. Hubungan keduanya kebanyakan dihiasi akan adanya kepentingan perdagangan. Selain itu tahun-tahun sebelum terjadinya konflik pada 2010 Tiongkok tidak begitu tertarik dalam menjalin hubungan dengan Suriah. Namun hubungan keduanya kian meningkat pasca perang tersebut terjadi, bersamaan pergantian rezim Tiongkok oleh Xi Jinping. Dalam wawancara khusus yang dilakukan oleh *China Phoenix Television* di Damaskus, Bashar al-Assad menyebutkan bahwa “*his regime's ties with China are strengthening as the situation within Syria and the geopolitics surrounding it shift*” (Taylor, 2017). Sehingga secara bersamaan dapat diartikan hubungan keduanya kian meningkat ketika pergantian rezim Tiongkok dan konflik Suriah terjadi. Tiongkok, telah sejak awal melibatkan diri ke dalam konflik Suriah, konflik yang dimulai pada awal 2010 telah meresahkan masyarakat internasional dan juga Tiongkok. Namun keterlibatan Tiongkok yang merupakan karakteristik dari diplomasi *multifaceted intervention* ditandai pada Desember 2015.

Kekacauan yang disebabkan konflik Suriah tidak mampu diselesaikan oleh Dewan Keamanan PBB, perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang berupaya menyelesaikan konflik telah mengakibatkan penyelesaian konflik semakin berlarut-larut. Pada 2014 kelompok militan bersenjata ISIS telah menguasai salah satu wilayah di Suriah, dimana ada laporan internasional yang menyatakan bahwa orang-orang Uighur terlibat dalam kelompok ISIS melawan pemerintah Suriah (Erdogan, 2014). Kondisi Suriah semakin diperparah setelah Rusia meluncurkan

serangan pertama kedelapan wilayah Suriah pada Oktober 2015, serangan tersebut diakui Rusia untuk menargetkan kelompok militan ISIS, namun AS membantah klaim tersebut, dimana Rusia telah menyerang masyarakat sipil Suriah yang berada dipihak oposisi (Yuhas, Borger, Ackerman, & Shaun Walker, 2015). Ketidakstabilan dan keterlibatan warga negara Tiongkok dalam konflik tersebut membuat Tiongkok mengambil langkah lebih awal untuk memastikan kedua belah pihak untuk bersedia terlibat dalam resolusi perdamaian PBB 2254, pada 18 Desember 2015 dimana PBB mendorong kedua belah pihak untuk menggelar perundingan pada awal Januari 2016. Di dalam resolusi tersebut bertujuan untuk mengusulkan peta jalan bagi proses perdamaian di Suriah, yang menetapkan garis besar untuk pembicaraan yang didukung oleh PBB.

II.2.1 Tiongkok Sebagai Aktor Netral Dalam Konflik Suriah

Tiongkok memiliki beberapa pandangan dan kepentingan yang sama dalam keterlibatan di konflik Suriah dengan Rusia. Keduanya memberikan hak vetonya untuk melindungi Suriah dan memastikan secara langsung kondisi stabilitas di Suriah, yaitu salah satunya karena adanya kepentingan untuk menjaga kawasan tersebut dari gerakan islam radikal (teroris) seperti ISIS dan Al-Qaeda. Dalam beberapa permasalahan yang terjadi di Tiongkok disebutkan bahwa bagaimana perkembangan kelompok islam radikal telah membawa dampak di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. Bersamaan dengan hal tersebut letak geografis Suriah berdekatan dengan Rusia, hal ini kemudian yang menjadi perhatian penting bagi Rusia bagaimana perkembangan kelompok islam radikal juga membawa dampak ancaman kamana terhadap

negaranya. Meskipun demikian peran yang diberikan keduanya berbeda dalam konteks konflik Suriah, dimana Rusia memainkan peran aktif dengan terlibat langsung di dalam intervensi militer ke Rusia. Sementara itu Tiongkok lebih cenderung berhati-hati dan tidak melakukan intervensi militer di dalam konflik Suriah untuk mencapai kepentingannya, karena alasan aktor-aktor yang terlibat.

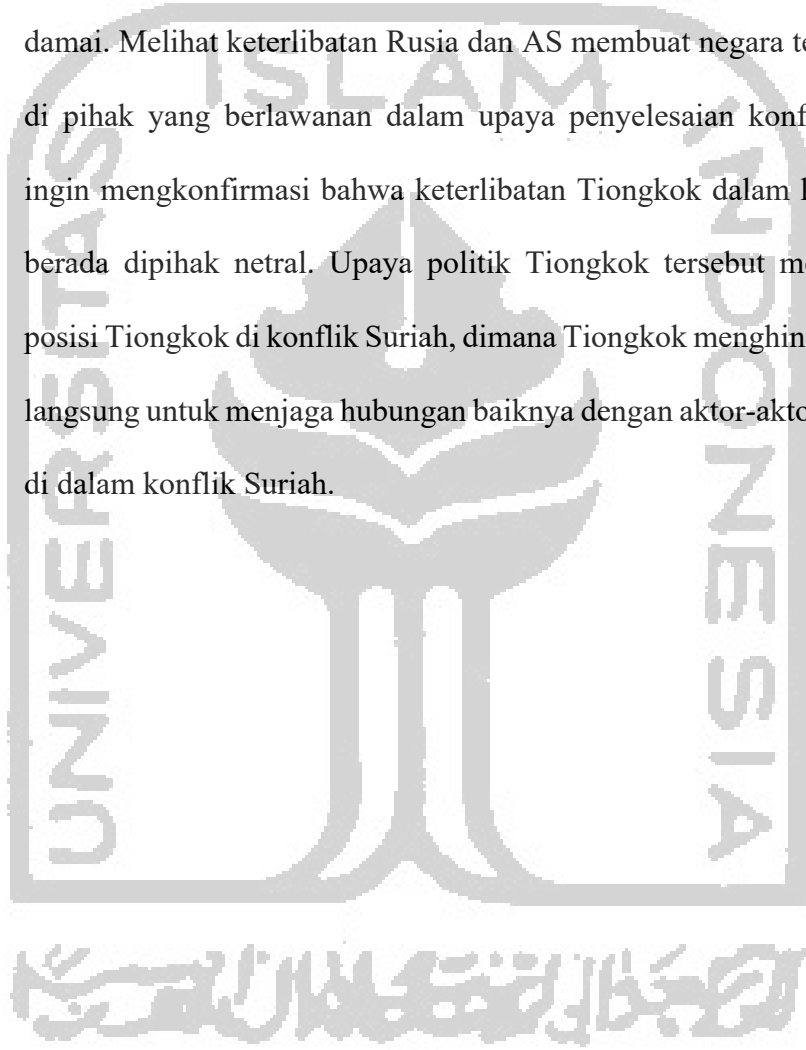
Penanganan konflik di Suriah oleh Tiongkok berbeda dengan aktor-aktor yang lain, Tiongkok dikenal sebagai negara yang selalu memegang prinsip non-intervensi. Prinsip ini telah menjadi pedoman dalam arah kebijakan luar negeri Tiongkok, telah lebih dari 60 tahun Tiongkok memegang prinsip tersebut, tepatnya sejak diresmikannya perjanjian *Panchsheel* sejak diresmikannya perjanjian *Panchsheel* atau '*Five Principle of Peaceful Coexistence*' (Ministry of External Affairs Government of India, 2004). Sikap non-intervensionis Tiongkok di konflik Suriah telah membantu Tiongkok dalam memperluas kekuatan *soft power* di Timur Tengah. Selain memveto beberapa resolusi yang telah dikeluarkan dewan keamanan PBB, Tiongkok juga aktif dalam mengirimkan utusan diplomatiknya untuk melakukan upaya penyelesaian konflik melalui jalur politik. Upaya diplomatik pertama yang dilakukan Tiongkok adalah pada 13 Maret 2012 Asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok yang juga merupakan utusan khusus Tiongkok, Zhang Ming, melakukan pembicaraan ke Kairo, bertemu dengan ketua Liga Arab, Nabil al-Arabi. Zhang Ming membahas mengenai permasalahan konflik Suriah dan juga regional lainnya. Zhang menyampaikan dalam kunjungannya tersebut bahwa "Tiongkok dan Liga

Arab memiliki konsensus yang luas pada krisis Suriah”. Ia berharap Tiongkok dan Liga Arab dapat melakukan upaya lebih lanjut terkait permasalahan di konflik Suriah. Dalam memperkuat komunikasi dan negosiasi penyelesaian konflik tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Liu Wei Min menyampaikan enam butir pernyataan yaitu (Mardiani, 2012):

- Menghentikan semua tindak kekerasan
- Meluncurkan dialog politik inklusif
- Mendukung upaya bantuan kemanusiaan
- Menghormati kedaulatan Suriah
- Menyambut penunjukan utusan khusus bersama oleh PBB dan Liga Arab
- Memastikan semua anggota Dewan Keamanan PBB mematuhi prinsip dan tujuan Piagam PBB.

Pada tahun yang sama selain mengunjungi Ketua Liga Arab, Zhang juga mengunjungi Mesir yang juga terdampak kekacauan akibat *Arab Spring*. Setelah mengunjungi Ketua Liga Arab, Zhang melanjutkan perjalanannya ke Perancis untuk melakukan lobi lebih lanjut dengan Paris terkait permasalahan konflik di Suriah. Masih pada tahun yang sama, Dr. Tim Summers menulis di halaman media bahwa Tiongkok juga aktif dalam melakukan perundingan bertemu dengan pihak pemerintah dan kelompok oposisi untuk menemukan jalan keluar mengakhiri konflik di Suriah. Dalam pertemuan tersebut Tiongkok menjadi tuan rumah bagi kedua kelompok. Tiongkok berupaya untuk konsisten tidak memihak kelompok manapun, hal

itu bertujuan untuk menjaga kepercayaan setiap kelompok yang berseteru. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Tiongkok ingin memperlihatkan posisinya kepada kedua kelompok bahwa ia tidak berada dipihak manapun (Summers, 2013). Hal ini dilakukan Tiongkok untuk memastikan upaya penyelesaian permasalahan di Suriah dapat dilakukan dengan cara yang damai. Melihat keterlibatan Rusia dan AS membuat negara tersebut berada di pihak yang berlawanan dalam upaya penyelesaian konflik, Tiongkok ingin mengkonfirmasi bahwa keterlibatan Tiongkok dalam konflik Suriah berada dipihak netral. Upaya politik Tiongkok tersebut memperlihatkan posisi Tiongkok di konflik Suriah, dimana Tiongkok menghindari intervensi langsung untuk menjaga hubungannya dengan aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik Suriah.



II.2.2 Tiongkok Menjadi Tuan Rumah Dalam Upaya Dialog Damai

Desember 2015 Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mendesak kelompok-kelompok oposisi dan pemerintah Suriah untuk ikut terlibat dalam dialog damai dan negosiasi tanpa syarat yang akan dilaksanakan pada Januari 2016 di Jenewa. Wang bertemu dengan Alptekin Hocaoglu di Beijing, Alptekin Hocaoglu atau juga dikenal dengan nama Khaled Khoja merupakan ketua koalisi dari pihak oposisi *National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces* (NCSROF). Tiongkok memilih untuk mengundang NCSROF ke Beijing adalah karena kelompok oposisi ini mewakili seluruh masyarakat Suriah, dan telah dilegitimasi oleh banyak negara dunia, seperti beberapa diantaranya adalah AS dan Uni Eropa (UE). Dimana Tiongkok melihat bahwa kelompok ini merupakan representasi yang sebenarnya dari masyarakat Suriah.

Pada pertemuan tersebut Wang mendesak pimpinan koalisi oposisi untuk mendukung upaya perdamaian oleh PBB dan ikut serta dalam pembicaraan damai yang akan dilaksanakan pada Januari 2016 bersama pihak pemerintah Suriah (Xiaokun, 2016). Beberapa hari sebelum pertemuan Wang dengan ketua koalisi oposisi Suriah, Wang telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem pada 23 Desember. Wang juga mengajak hal yang sama kepada al-Moallem untuk ikut serta dalam pembicaraan damai yang akan diselenggarakan oleh Dewan Keamanan PBB pada Januari 2016. Dialog tersebut disambut positif oleh perwakilan al-Moallem, ia mengatakan *"Our delegation will be ready as*

soon as we receive a list of the opposition delegation” (Syria ready to take part in Geneva peace talks: Minister, 2015).

Bersama dengan upaya diplomatik tersebut, Tiongkok juga menjanjikan penambahan 40 juta Yuan untuk bantuan kemanusiaan ke Suriah agar kedua kelompok mau ikut serta dalam perundingan tersebut (Qingyun, 2016). Desakan ini dilakukan Tiongkok setelah memprediksi serangan yang sebelumnya dilakukan Rusia diperkirakan akan berdampak pada serangan balasan dari pihak oposisi dan mengakibatkan solusi damai akan sulit didapatkan. Upaya meredam gencatan senjata adalah jalan terbaik untuk menghindari perang selanjutnya bagi Tiongkok. Hasil kunjungan kedua belah pihak ke Beijing saat itu antara lain adalah menyetujui untuk mengikuti dialog damai yang akan dilakukan pada sidang Dewan Keamanan PBB pada Januari 2016. Adapun isi dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung oleh Tiongkok pada 18 Januari di New York tersebut adalah sebagai berikut (Resolution 2254 , 2015):

- Menyerukan gencatan senjata dan perundingan formal mengenai transisi politik yang dimulai pada awal Januari.
- Kelompok yang dipandang sebagai ‘teroris’, termasuk ISIS dan Front Al-Nusra, dipinggirkan.
- ‘Aksi defensif dan ofensif’ terhadap kelompok-kelompok ini mengacu pada serangan udara koalisi pimpinan AS dan Rusia akan berlanjut.
- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon akan melapor pada 18 Januari mengenai cara memantau gencatan senjata.

- ‘Tata pemerintahan yang kredibel, inklusif, dan non-sektarian’ akan dibentuk dalam kurun enam bulan.
- ‘Pemilihan umum yang adil dan bebas’ di bawah pemantauan PBB akan diselenggarakan dalam 18 bulan.
- Transisi politik harus dipimpin Suriah

Resolusi tersebut disetujui oleh 5 anggota permanen dan 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Namun upaya negosiasi perdamaian tersebut gagal setelah pihak oposisi pada Februari 2016 menuduh Suriah dan Rusia telah membunuh kurang lebih 300 orang setelah kesepakatan pada bulan sebelumnya telah dilakukan oleh kedua pihak (Tempo, 2016).

Bila dibandingkan dengan AS dan Rusia, Tiongkok memiliki keuntungan untuk lebih leluasa dalam melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Hal itu disebabkan oleh sikap Tiongkok yang sejak awal telah mendeklarasikan dirinya bahwa ia tidak mendukung upaya intervensi dalam bentuk apapun dan menyatakan diri sebagai pihak yang netral. Meskipun demikian, sikap Tiongkok dalam menangani konflik mengalami perubahan bila dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, dimana para pemimpin sebelumnya selalu menjunjung tinggi prinsip kedaulatan suci yaitu menolak intervensi langsung dan penyelesaian masalah tersebut diserahkan penuh kepada internal negara yang bersangkutan. Dalam mengamati pola indikator sikap Tiongkok tersebut Michael D. Swaine melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir sikap tradisional Tiongkok dalam urusan intervensi asing mengalami beberapa

perubahan yang cukup signifikan (Swaine, 2012). Perubahan tersebut dapat dilihat dari tindakan Tiongkok cenderung berpartisipasi aktif dalam isu-isu internasional di sepanjang jalur BRI, namun dengan langkah yang berhati-hati

II.2.3 Utusan Khusus Tiongkok ke Suriah

Setelah melakukan upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik melalui dialog damai dalam pertemuan sidang Dewan Keamanan PBB pada Januari 2016, Tiongkok terus aktif untuk mempercepat rekonsiliasi keduanya. Pada 16 Agustus 2016 Tiongkok untuk pertama kalinya mengirimkan utusan diplomatiknya ke wilayah konflik Suriah, di Damaskus. Direktur Kantor Kerjasama Militer Internasional Komisi Militer Pusat Tiongkok, Guan Youfei terbang ke Damaskus pada Selasa Agustus bertemu Menteri Pertahanan Suriah Fahad Jassim al-Frei. Dalam tujuan politisnya tersebut Guan menyampaikan secara konsisten Tiongkok mendorong pencapaian resolusi konflik di Suriah. Dikutip dari *Xinhuan* Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas untuk meningkatkan pelatihan militer dan bantuan kemanusiaan ke Suriah. Dimana keduanya mencapai kesepakatan untuk pelatihan personil tentara Suria untuk melatih para tentara Suriah yang baru saja membeli senjata dari Tiongkok dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada tentara Suriah (Xinhua, 2016).

Tabel 2.1 Upaya Diplomasi Multifaceted Tiongkok Di Konflik Suriah

| | |
|--|--|
| <p>Pernyataan Posisi Netral Tiongkok Dalam Keterlibatan Di Konflik Suriah</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pada 13 Maret 2012 Asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok Zhang Ming bertemu dengan ketua Liga Arab, Nabil al-Arabi untuk membahas mengenai permasalahan konflik Suriah dan juga regional lainnya. • Pada tahun yang sama Zhang juga mengunjungi pihak pemerintah dan pihak oposisi untuk memperlihatkan posisi netral. |
| <p>Tiongkok Menjadi Tuan Rumah Dalam Upaya Dialog Damai</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Desember 2015 Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mendesak kelompok-kelompok oposisi dan pemerintah Suriah untuk ikut terlibat dalam dialog damai dan negosiasi tanpa syarat yang akan dilaksanakan pada Januari 2016 di Jenewa. |
| <p>Utusan Khusus Tiongkok ke Suriah</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pada 16 Agustus 2016 Tiongkok Guan Youfei terbang ke Damaskus untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Suriah Fahad Jassim al-Frei. |

BAB III

FAKTOR PENDORONG QUASI MEDIATION TIONGKOK DALAM KONFLIK SURIAH

Dalam bab sebelumnya telah dibuktikan bahwa peranan Tiongkok di dalam konflik Suriah benar adanya menggunakan pendekatan diplomasi *quasi mediation*. Dimana peran yang diambil Tiongkok berada pada level *multifaceted intervention*. Selain melihat pola peranan Tiongkok dalam konflik di Timur Tengah, teori *quasi mediation* juga menjelaskan faktor-faktor yang mendorong Tiongkok menggunakan diplomasi *quasi mediation*. Oleh karena itu, bab ini akan menganalisa alasan mengapa Tiongkok berperan secara *multifaceted* dalam konflik Suriah.

III.1 Relevan Dengan Kepentingan Komersial

Perubahan kebijakan ekonomi Tiongkok dalam menghadapi reformasi ekonomi yang dideklarasikan oleh Presiden Xi Jinping telah menjadi prioritas utama bagi negara tersebut dalam melancarkan modernisasi ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus meningkat dan menempati posisi kedua ekonomi terbesar dunia setelah AS. Ini membuktikan keseriusan Tiongkok dalam melakukan agenda reformasi ekonominya tersebut. Untuk mendukung agenda tersebut Tiongkok sadar akan erlunya kebijakan-kebijakan lainnya untuk mendukung agenda reformasi ekonomi tersebut. Kerjasama bilateral terus meningkat dengan berbagai negara-negara diberbagai kawasan dunia, dimana Tiongkok lebih aktif dalam kerjasama bilateral dibandingkan dengan kerjasama

multilateral yang dilaksanakan dengan suatu kawasan. Faktor komersial merupakan faktor pendorong utama Tiongkok untuk ikut serta aktif dalam setiap agenda internasional, karena hal itu merupakan tujuan utama dari kebijakan *China Dream*. Dalam hal ini konflik Suriah menjadi prioritas Tiongkok untuk ikut aktif dikawasan Timur Tengah, namun selain itu langkah ini diambil Tiongkok juga untuk mengamankan beberapa kepentingan Tiongkok yang ada disana, diantaranya adalah:

III.1.1 Belt and Road Initiative (BRI) di Suriah

Geostrategi menjadi salah satu alasan utama Tiongkok ikut serta dalam konflik Suriah. Untuk mengamankan *proyek belt and road initiative* Tiongkok menuju kawasan Timur Tengah. Dimana proyek tersebut nantinya akan menjadi jembatan dari Tiongkok menuju Eropa. Timur Tengah telah menjadi sentral diplomatik Tiongkok melaksanakan proyek tersebut, investasi Tiongkok di negara-negara Teluk telah mencapai \$60 miliar pada 2017 (Ahmad, 2019). Berbeda dengan sebelum proyek tersebut dicetuskan, sikap Tiongkok lebih cenderung menghindari peranannya dan mengambil langkah mundur dalam setiap permasalahan dikawasan tersebut. Seperti sikap Tiongkok pada konflik di Libya tahun 2011, Tiongkok lebih memilih abstain dalam resolusi yang ditawarkan Dewan Keamanan PBB. Namun setelah proyek BRI dideklarasikan pada 2012 hampir semua langkah politik Tiongkok di Timur Tengah mengalami perubahan, salah satunya adalah mendukung reformasi ekonomi Tiongkok.

Meskipun Suriah belum menjadi prioritas strategis proyek BRI bagi Tiongkok namun bukan berarti Tiongkok menganggap remeh terhadap apa yang terjadi di Suriah. Karena Suriah terletak di lokasi geostrategis penting yang menghubungkan Asia Barat-Tengah ke Timur Tengah dan Afrika. Konflik Suriah secara bersamaan telah mengganggu stabilitas kawasan di Timur Tengah, dan akan berdampak menghambat pelaksanaan proyek BRI yang nantinya akan melewati negara tersebut. Meskipun Tiongkok dan Pemerintah Assad tidak memiliki hubungan politik dan ekonomi yang signifikan, Tiongkok khawatir konflik tersebut akan berdampak pada tumbuhnya kelompok-kelompok militan bersenjata (teroris), yang secara bersamaan akan mengganggu stabilitas di Suriah dan berdampak pada kawasan yang lainnya juga (Weitz, 2013). Beberapa tahun setelah konflik Suriah berlangsung, kelompok militan ISIS mengambil keuntungan atas melemahnya sistem pertahanan Suriah dan berhasil menguasai wilayah Raqqa dan Fallujah pada Maret 2013 (Hawat & Dukhan, 2014). Mereka merupakan para militan yang berasal dari kekacauan di Irak. Tiongkok sadar kedatangan kelompok-kelompok tersebut akan membuat kekacauan yang akan berdampak pada kepentingan energi dan proyek BRI Tiongkok di kawasan tersebut. Hal ini yang kemudian mendorong Tiongkok untuk mengamankan Suriah dari kelompok-kelompok teroris.

Alasan lain dalam upaya diplomatik yang dilakukan Tiongkok di konflik Suriah juga dikarenakan Tiongkok melihat bahwa pelabuhan Tripoli di laut Mediterania Timur Suriah dapat menjadi jalur alternatif

proyek BRI dari jalur terusan Suez. Hal ini membuat Tiongkok berupaya untuk mengamankan pelabuhan tersebut. Dalam beberapa pernyataan Bashar al-Assad mengenai rekonstruksi Suriah, negara-negara yang telah berperan besar dalam membantu rezim tersebut akan mendapat prioritas untuk ikut serta dalam rekonstruksi Suriah yaitu Iran, Rusia, dan Tiongkok (Maloof, 2016). Upaya diplomatik yang selama ini dilakukan Tiongkok telah memberikan hasil terhadap hubungan kedua negara tersebut. Suriah menjadi lebih terbuka terhadap kebijakan-kebijakan Tiongkok yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut. Mengingat masalah Suriah terkait keamanan regional yang sedang terjadi yaitu terorisme, kesengsaraan ekonomi, dan kebutuhan akan infrastruktur, investasi, dan perdagangan. Maka Tiongkok dengan cepat menawarkan bantuan ke Suriah.

Kebijakan Tiongkok di konflik Suriah berasal dari kepentingan yang lebih luas yaitu pertama upaya untuk menjaga hubungan diplomatik dengan pemerintah Damaskus, dan kedua mengembangkan kemitraan ekonomi dalam pelaksanaan proyek BRI (Calabrese, 2019). Pada pertengahan 2017 Tiongkok menjadi pameran dagang pertama proyek rekonstruksi Suriah. Dimana Tiongkok berkomitmen memberikan kontribusi US\$ 2 miliar untuk membangun industri Tiongkok, dengan membawa 150 perusahaan ke Suriah (Morris, 2018). Langkah untuk mencapai kepentingan Tiongkok di Suriah terus dilakukan, dimana pada 2018 Tiongkok membawa lebih dari 200 perusahaan dalam Pameran Perdagangan Internasional Damaskus ke-60. Tiongkok banyak

menawarkan upaya rekonstruksi dengan dihadirkannya ratusan industri ke negara tersebut. Namun yang terjadi upaya tersebut bukan merupakan upaya untuk membantu Suriah dalam memperbaiki kekacauan dinegaranya. Melainkan hanya sebuah kamufase untuk melaksanakan proyek BRI Tiongkok di Suriah. Kehadiran industri-industri Tiongkok disana merupakan upaya untuk melancarkan kepentingan proyek BRI Tiongkok di Suriah.

III.1.2 Hubungan Ekonomi Tiongkok Dengan Negara-Negara di Timur Tengah

Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki peran signifikan di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun Tiongkok adalah pendatang baru di kawasan tersebut, namun peranannya semakin meningkat terutama dibidang perdagangan dengan negara-negara di kawasan tersebut. Komoditas utama perdagangan keduanya tertuju pada sektor minyak dan gas alam, diketahui Timur Tengah merupakan pemasok utama gas alam cair ke Tiongkok. Ketika pada saat yang sama dominasi AS telah mengalami penurunan di wilayah tersebut, kehadiran Tiongkok menjadi peran potensial disana. Hubungan Tiongkok dengan kawasan tersebut terus meningkat sejak adanya proyek BRI pada 2013, dimana kemudian Tiongkok menjadi importir minyak global terbesar di dunia. Tiongkok juga telah menandatangani perjanjian dengan 15 negara di Timur Tengah untuk memperkuat kerjasama ekonomi.

Pada waktu yang sama, Tiongkok juga telah menjadi negara ekspor terbesar di dunia, menempati posisi pertama dan disusul AS pada posisi kedua. Menurut laporan dari Lembaga Statista nilai ekspor Tiongkok pada tahun 2017 adalah sekitar US\$ 2.3 Triliun (Duffin, 2019). Dimana Ekspor Tiongkok berasal dari industri manufaktur, hal tersebut membuat kebutuhan sumber daya energi Tiongkok terus meningkat. Diketahui dari tahun 1999 sampai 2015 kebutuhan sumber daya energi Tiongkok terus mengalami peningkatan, terutama dalam konsumsi sumber daya energi batu bara dari 1.05 miliar ton menjadi 3.97 miliar ton pertahun. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar industri manufaktur Tiongkok menggunakan sumber daya batu bara. Sementara itu peningkatan urbanisasi telah berdampak pada peningkatan masyarakat untuk membeli mobil. Sehingga hal ini di prediksi akan menambah kebutuhan energi Tiongkok kedepannya.

Untuk memenuhi kebutuhan energinya tersebut Tiongkok mendapatkan banyak pasokan energi dari Timur Tengah. Lebih dari 50% pasokan energi datang dari kawasan Timur Tengah (Anonim, 2016).

Konflik Suriah telah membawa kekhawatiran terhadap impor energi ke Tiongkok dari wilayah tersebut. Hal ini kemudian yang menjadi salah satu faktor pendorong Tiongkok untuk terlibat di dalam konflik tersebut, yaitu untuk mengamankan impor energi untuk kebutuhannya. Diketahui sebagian besar negara yang terlibat dalam konflik Suriah merupakan negara-negara yang sebagian besar memasok kebutuhan energi untuk Tiongkok, seperti Rusia, Arab Saudi, dan Iran. Sehingga kehadiran

Tiongkok di dalam konflik Suriah dapat dikatakan untuk menjaga citranya dengan negara-negara mitra dagangnya.

III.2 Jangkauan Pengaruh Tiongkok (Internal)

Menurut artikel yang ditulis oleh Degang Sun dan Yahia Zoubir, Tiongkok akan berkenan untuk memediasi kedua belah pihak yang berkonflik apabila Tiongkok memiliki akses hubungan dengan keduanya. Dalam hal ini respon yang ditunjukkan kedua belah pihak terhadap kehadiran Tiongkok menjadi tolak ukur untuk Tiongkok terlibat dalam penyelesaian konflik. Pada dasarnya Tiongkok enggan untuk menggunakan sumber dayanya dalam mencapai penyelesaian konflik, sehingga dengan kedekatan Tiongkok dengan kedua belah pihak pada akhirnya akan membuat Tiongkok berperan dengan menggunakan *quasi mediation*. Selain itu ada pula hal mendasar yang membuat Tiongkok ingin menyebarkan pengaruhnya di konflik Suriah, hal tersebut merupakan hasil dari representatif dari kebijakan luar negeri Tiongkok.

III.2.1 Xi Jinping dan Konsep China Dream

Konsep *China Dream* adalah agenda politik kepemimpinan Xi Jinping yang merupakan konsep pembangunan bagi Tiongkok dalam mencapai tujuan reformasi ekonomi berkelanjutan. Konsep ini juga dicetuskan untuk mendorong Tiongkok lebih berperan dalam dunia internasional. Xi menjadikan impian tersebut sebagai kampanye nasional dan memerintahkan seluruh kalangan untuk bekerjasama dalam mencapai impian tersebut. Impian tersebut merupakan salah satu upaya

yang dilakukan Xi untuk menyelesaikan permasalahan dalam negeri yang selama ini dialami pemerintahan sebelumnya, yaitu dengan kampanye anti-korupsi, menjaga stabilitas domestik, mempertahankan kendali partai PKC, mendapatkan legitimasi dari masyarakat atas kepemimpinannya, dan kembali melayani masyarakat Tiongkok. Kebijakan *China Dream* yang dikeluarkan oleh XI Jinping terinspirasi dari buku yang ditulis oleh Kolonel Liu Mingfu yang berjudul "*China Dream: The Great Power Thinking and Strategic Positioning in the Post-American Age*" (Mingfu, 2009).

Di dalam artikel yang ditulis oleh Dewan Negara Yang Jiechi yang berjudul "*Implementing the Chinese dream*", ia mengatakan bahwa "*Chinese dream*" requires a peaceful and stable international and neighboring environment and China is committed to realizing the dream through peaceful development". Diperkuat dengan pernyataannya yang lain juga yaitu "*Chinese dream*" is closely linked with the dreams of other peoples around the world, China is committed to helping other countries, developing countries and neighboring countries in particular"

(Jiechi, 2013). Hal tersebut mengartikan bahwa kebijakan *China Dream* tidak hanya ingin diwujudkan dalam lingkup nasional, melainkan Tiongkok ingin mewujudkan dalam ruang lingkup internasional..

Seperti melalui pidato-pidato dan pernyataan pemimpin Tiongkok dalam agenda internasional. Pada Majelis Umum PBB pada 2013, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memberikan pernyataan "*China at a New Starting Point*" (Yi, 2013). Pernyataan tersebut telah

menunjukkan kepada negara-negara lain mengenai visi Tiongkok dalam beberapa tahun kedepan, dan menempatkan Tiongkok sebagai aktor penting dalam tatanan internasional. Momen penting lainnya juga disampaikan dalam pernyataan lain yang juga disampaikan Pemimpin Tiongkok salah satunya pada sebuah wawancara menjelang KTT antara Tiongkok dan juga AS yang diwakili oleh Presiden Barack Obama pada Juni 2013 di AS, Xi mengatakan bahwa akan lebih berperan penting dalam mewujudkan dunia yang damai (Xinhuan, 2013). Agenda politik tersebut terus dilakukan pemerintahan Tiongkok dalam forum-forum internasional sejak 2013 kebijakan *China Dream* disampaikan kepada masyarakat internasional.

III.2.2 Memperlihatkan Citra Tiongkok yang Aktif Ditatanan

Internasional

Berkaitan dengan upaya Tiongkok di konflik Suriah, Tiongkok lebih memilih memainkan peran diplomatik. Berbeda dengan tahun kepemimpinan Deng Xiaoping, dimana Tiongkok tampak lebih tidak peduli dengan permasalahan-permasalahan diluar negaranya, hal tersebut dapat dilihat dari posisi Tiongkok dalam beberapa agenda resolusi PBB Tiongkok lebih sering abstain, Xi Jinping ingin mempromosikan posisi Tiongkok yang memiliki peranan penting dalam setiap agenda internasional. Dalam peranannya Tiongkok lebih memilih kebijakan non-intervensi dalam ikut serta permasalahan negara lain, bila dibandingkan dengan negara-negara *major power* lainnya. Seperti dalam

konflik MENA Tiongkok juga lebih memilih untuk berpartisipasi secara hati-hati, dan tetap memegang teguh prinsip non-intervensi. Hal itu dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan Tiongkok, dimana ia lebih memilih langkah negosiasi dan koordinasi politik daripada melakukan tindak paksaan (REN, 2014). Namun meskipun aktif dalam beberapa agenda internasional, Tiongkok cenderung tebang pilih dalam keikutsertaannya. Sebagaimana dilihat dari upaya Tiongkok untuk mempertahankan citranya dihadapan negara-negara Timur Tengah. Tiongkok melihat bagaimana sejarah AS di Timur Tengah memiliki reputasi yang buruk, hal ini menjadi alasan kehadiran Tiongkok untuk menjadi penolong dikawasan tersebut dan meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara dikawasan tersebut.

III.3 Jangkauan Pengaruh Tiongkok (Eksternal)

Hubungan Tiongkok dan negara-negara Timur Tengah pertama kali diawali dengan hubungan dagang. Dalam kurun waktu 13 tahun yaitu dari 1999-2000 kerja sama antara Tiongkok dengan negara-negara di kawasan tersebut kian meningkat. Hal itu terbukti dengan terjalannya kerja sama antara Tiongkok dengan Aljazair, Mesir, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi. Namun sejak proyek BRI dideklarasikan kerjasama Tiongkok meningkat pesat dalam jangka waktu 5 tahun. Setelah dimulainya proyek BRI Tiongkok telah membentuk kemiteraan dengan sembilan negara dikawasan itu, yaitu Yordania, Qatar, Israel, Iran, dan Irak (Noi, 2019). Kerjasama ini terus meningkat dengan keterlibatan Tiongkok di beberapa isu Timur Tengah. Peran aktif Tiongkok dilatarbelakangi

karena adanya kepentingan politik untuk memiliki teman baru dan menyebarkan pengaruhnya di Timur Tengah.

III.3.1 Tiongkok Ingin Memiliki Teman Baru Di Timur Tengah

Kepentingan Tiongkok di konflik Suriah memang tidak bisa terlepas dari kepentingan ekonomi dan energi. Dalam beberapa tahun terakhir peranan Timur Tengah terhadap Tiongkok menjadi perhatian tersendiri bagi negara tersebut. Meningkatnya ancaman teroris yang dikhawatirkan akan mengancam pasokan energi dari kawasan Timur Tengah ke Tiongkok. Namun pada saat yang sama peran Timur Tengah bagi Tiongkok telah berkembang, sebelumnya kerjasama politik Tiongkok dengan kawasan tersebut merupakan cara untuk mencapai kepentingan ekonominya (Jiadong, 2016). Melalui partisipasi di dalam konflik Suriah, Tiongkok berupaya meningkatkan citranya dihadapan negara-negara Timur Tengah. Cara ini dilakukan Tiongkok untuk menarik simpati dari negara-negara Timur Tengah dan melegitimasi kepedulian Tiongkok melalui perjanjian kerjasama Tiongkok dengan beberapa negara melalui konflik Suriah. Seperti pertemuan yang dilakukan Tiongkok pada Maret 2012 dengan ketua Liga Arab, Nabil al-Arabi. Tiongkok melihat hubungan politik Tiongkok dengan negara-negara Timur Tengah tidak hanya untuk mencapai kepentingan ekonominya. Melainkan juga dapat menjadi aset diplomatik bagi Tiongkok untuk mendukung kepentingan Tiongkok di dalam organisasi-organisasi internasional seperti salah satunya PBB untuk melawan

negara-negara barat. Selain itu hubungan Tiongkok dan AS yang tidak baik akibat perang dagang antar keduanya, membuat Tiongkok ingin mencari teman baru di Timur Tengah.

III.3.2 Tiongkok Ingin Menyebarkan Pengaruhnya Diluar Regional

Asia Timur

Salah satu tujuan di dalam isi *China Dream* adalah untuk menyebarkan pengaruh Tiongkok di luar kawasan Asia Timur. Kemunduran pengaruh AS di Timur Tengah telah menjadi peluang bagi Tiongkok untuk mengisi kekosongan tersebut. Latar belakang sejarah AS yang buruk terhadap intervensi-intervensi yang dilakukannya seperti di Libya telah menjadi penyebab kekecewaan negara-negara Timur Tengah kepada AS (Kuperman, 2015). Meskipun Tiongkok telah menjadikan Timur Tengah sebagai ladang minyak yang akan terus mengirim pasokan minyak untuk kebutuhannya, Karena kebutuhan energi Tiongkok terus tumbuh 15% pertahun. Namun Tiongkok juga memiliki minat yang kuat untuk menyebarkan pengaruhnya di Timur Tengah, karena mereka kaya akan minyak dan gas alam. Minat tersebut secara langsung akan mengurangi pengaruh AS di kawasan tersebut (Bader, 2005).

Meskipun pengaruh Tiongkok di Timur Tengah akan menggeser posisi AS, namun Tiongkok memahami AS tidak dapat diabaikan begitu saja. Angkatan laut AS masih memiliki peranan dominan dalam mengamankan perairan dibanyak negara, serta jalur perdagangan dunia.

Sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan Tiongkok akan selalu mempertimbangkan langkah AS di dikawasan tersebut.

III.4 Konsensus Kekuatan Besar

Tiongkok terkesan sangat berhati-hati dalam mengambil setiap langkah kebijakan di Timur Tengah. Keterlibatan negara-negara *major power* menjadi tolak ukur Tiongkok untuk mengeluarkan kebijakannya dikawasan tersebut. Langkah ini diambil dalam menentukan keterlibatan Tiongkok di dalam konflik tersebut, apabila semakin besar kemungkinan negara-negara *major power* untuk terlibat di dalam suatu konflik maka semakin besar kemungkinan Tiongkok akan menggunakan diplomasi *quasi mediation* di dalam konflik tersebut dimana Tiongkok cenderung akan mundur apabila tidak ada konsensus kekuatan besar karena Tiongkok khawatir akan gagal menangani penyelesaian konflik yang berdampak pada citra Tiongkok dimasa depan. Konflik Suriah telah melibatkan negara-negara *major power* seperti AS, Rusia, dan Eropa sehingga Tiongkok mengambil langkah diplomasi tersebut di dalam konflik Suriah. Dimana langkah yang diambil Tiongkok adalah dengan menghindari intervensi militer di dalam konflik tersebut. Karena dengan adanya tindakan intervensi militer dari Tiongkok, hal tersebut akan memecah hubungan Tiongkok dengan negara-negara yang terlibat di dalam konflik tersebut. Seperti yang terjadi antara AS dan Rusia, hubungan keduanya semakin memburuk dimana pemerintah AS telah memberlakukan puluhan sanksi terhadap Rusia (Osborn & Tsvetkova, 2019). Hal tersebut tentu tidak diinginkan Tiongkok terjadi terhadap hubungannya dengan negara-negara yang terlibat di dalam konflik tersebut. Karena hampir sebagian

besar negara-negara yang terlibat di dalam konflik tersebut merupakan mitra dagang Tiongkok seperti AS, Rusia, Eropa, Arab Saudi, dan Iran.

Upaya tersebut dilakukan Tiongkok karena pertama, AS merupakan mitra dagang terbesar Tiongkok, dimana nilai ekspor yang didistribusikan oleh Tiongkok ke negara Adidaya tersebut sebesar 19,2% dari total seluruh nilai Ekspor Tiongkok (Workman, 2019). Kedua, sementara itu hubungan Tiongkok dengan negara-negara teluk telah membuat Tiongkok bergantung terhadap sumber pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan industri di negaranya. Arab Saudi dan Iran merupakan dua negara yang berperan penting dalam pemasok kebutuhan energi Tiongkok, Arab Saudi telah berperan memasok kebutuhan energi minyak mentah Tiongkok sebesar 14% sementara itu Iran telah berperan memasok 8% dari total keseluruhan minyak mentah Tiongkok (How is China's energy footprint changing?, 2018). Ketiga, konflik Suriah pertama kali mendapatkan perhatian dari negara-negara Eropa seperti Perancis dan Jerman. Eropa merupakan pasar potensial bagi Tiongkok setelah AS, dimana banyak industri-industri Eropa yang berinvestasi di Tiongkok. Eropa merupakan pasar terbesar kedua bagi Tiongkok, nilai perdagangan keduanya mencapai € 1 Miliar perhari (China, 2019). Selain itu hubungan keduanya juga didukung kepentingan Tiongkok atas proyek BRI Tiongkok yaitu Eropa akan menjadi destinasi terakhir proyek tersebut. Keempat, Rusia merupakan salah satu mitra kerjasama penting untuk Tiongkok. Kerjasama ekonomi, politik dan militer telah memperkuat hubungan keduanya. Selain itu Rusia merupakan salah satu dari tiga produsen minyak dan gas alam terbesar dunia dan merupakan negara pengimpor minyak mentah terbesar didunia untuk Tiongkok yaitu mencapai 15% (Ellyatt, 2019).

Keberadaan Rusia disamping Tiongkok tentunya akan menjadi tekanan tersendiri bagi AS, karena kekuatan militer Rusia yang tidak mungkin diragukan. Keberadaan negara-negara *major power* di dalam konflik Suriah telah menjadi pertimbangan Tiongkok untuk terlibat langsung di dalam konflik tersebut. Kehadiran negara-negara tersebut telah menjadi tolak ukur langkah yang diambil Tiongkok untuk melihat sekitarnya dalam menentukan kebijakannya di konflik tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keterlibatan aktor-aktor lain di dalam konflik Suriah telah menjadi kesempatan bagi Tiongkok untuk menggunakan diplomasi *quasi mediation*. Dengan keterlibatan aktor-aktor lain Tiongkok tidak perlu melakukan pengeluaran lebih banyak dalam mengirim bantuan kemanusiaan dalam upaya keterlibatannya di konflik Suriah. Karena aktor-aktor lain telah berperan dalam memberikan bantuan serta memberikan fasilitas untuk pertemuan dalam penyelesaian konflik Suriah.

III.5 Tingkat Kesulitan Dalam Penyelesaian Konflik

Faktor ini mengacu pada potensi kemungkinan konflik tersebut mudah diselesaikan maka keterlibatan Tiongkok di dalam konflik tersebut akan semakin mudah. Dalam hal ini konflik Suriah dapat dikategorikan sebagai konflik yang sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut karena pertama, konflik yang terjadi telah melibatkan banyak aktor yang berakibat pada *multilateral conflict* dimana setiap kelompok memiliki kepentingannya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan di Suriah, sehingga konflik tersebut sulit untuk mencapai resolusi damai untuk menyudahi konflik tersebut. Kedua, konflik yang terjadi tidak hanya melibatkan

kelompok-kelompok yang berasal dari dalam negara Suriah melainkan juga mendapatna dukungan-dukungan dari negara-negara lainnya seperti AS, Rusia, Arab Saudi, dan Iran. Ketiga, pemerintah Rezim Bashar al-Assad mendapatkan dukungan militer dari Rusia sehingga pemerintah memiliki keberanian untuk melawan intervensi dari otoritas Dewan Keamanan PBB.

Dalam hal ini penulis melihat banyaknya rintangan yang harus dihadapi dalam penyelesaian Suriah akan menurunkan minat Tiongkok untuk terlibat di dalamnya. Namun Tiongkok telah berhasil meraih kepercayaan kedua belah pihak yang berseteru yaitu pihak oposisi dan pihak pemerintah. Sehingga pada Desember 2015 Tiongkok berhasil membujuk keduanya untuk datang ke Beijing, dalam upaya melakukan mediasi pada Januari 2016 melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Meskipun upaya resolusi tersebut tidak memberikan hasil pada penyelesaian konflik, upaya Tiongkok dengan menjadi pihak yang netral telah membuktikan kemampuan Tiongkok dalam melakukan upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut.

Penulis melihat upaya ini terus dilakukan Tiongkok untuk melakukan pembicaraan dengan kedua belah pihak karena sejak awal Tiongkok telah mendeklarasikan dirinya berada dipihak yang netral. Sehingga Tiongkok yakin bahwa keduanya dapat mengikuti upaya-upaya yang dilakukan Tiongkok untuk meminimalisir dampak konflik tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya jalur pipa gas energi dibawah Suriah, sehingga apabila konflik tersebut terus berlanjut maka kemungkinan yang akan terjadi akan mengganggu aktivitas pengiriman pasokan energi ke Tiongkok.

**Tabel 3.1 Faktor-faktor yang Mendorong Tiongkok Menggunakan Quasi
Mediation “Multifacted Intervention” Di Dalam Konflik Suriah**

| | |
|--|--|
| <p>Relevan Dengan Kepentingan Komersial</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan pembangunan proyek <i>Belt and Road Initiative (BRI)</i> • Menjaga hubungan ekonomi dengan negara-negara Timur Tengah |
| <p>Jangkauan Pengaruh Tiongkok</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan Tiongkok untuk merangkul pihak oposisi dan pihak pemerintah |
| <p>Konsensus Kekuatan Besar</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya peranan negara-negara major power dan lembaga internasional PBB di dalam konflik Suriah |
| <p>Tingkat Kesulitan Dalam Penyelesaian Konflik</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tiongkok berhasil meraih kepercayaan kedua belah pihak yang sedang berkonflik |

BAB IV

KESIMPULAN

IV.1 Kesimpulan

Suriyah merupakan negara yang memiliki peranan penting bagi Tiongkok. Keduanya memiliki hubungan kerja sama yang erat dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Hubungan kerja sama antar-
kedua negara sudah berjalan sejak lama, hingga akhirnya harus terhambat disebabkan oleh konflik yang saat ini melanda Suriyah. Oleh karena itu, konflik yang saat ini terjadi di Suriyah, secara tidak langsung memberikan dampak negatif bagi Tiongkok, utamanya dalam hal perekonomian, mengingat sebelum terjadinya konflik di Suriyah, negara tersebut merupakan salah satu pasar bagi sektor perdagangan Tiongkok. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab masuknya Tiongkok dalam daftar negara yang ingin menyelesaikan konflik di Suriyah. selain berupaya untuk mengembalikan kestabilan kawasan di Timur Tengah, kehadiran Tiongkok dalam konflik Suriyah bertujuan untuk menjaga kepentingan geopolitik dan geoekonomi Tiongkok di Suriyah. Ketidakstabilan kawasan Timur Tengah menjadi salah satu alasan utama Tiongkok untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik di Suriyah, hal itu dilakukan Tiongkok semata-mata untuk menjaga stabilitas di sepanjang rute BRI dan memastikan kelancaran arus perdagangan dan investasi serta meningkatkan keamanan bagi warga negara Tiongkok dan perusahaan yang tinggal dan beroperasi di sana. Upaya penyelesaian konflik Suriyah pertama kali telah dilakukan oleh Liga Arab, PBB, Rusia, dan AS pada 2011, namun upaya tersebut belum berhasil

menghentikan kekacauan yang terjadi di Suriah dan berdampak pada ketidakstabilan Timur Tengah.

Pada bab II, penulis mencoba membuktikan bahwa Tiongkok telah melakukan *quasi mediation* terhadap negara-negara di Timur Tengah dengan cara yang berbeda, seperti halnya peran Tiongkok di Suriah, dimana jika ditinjau dari perspektif *quasi mediation*, kebijakan diplomasi yang diterapkan Tiongkok dalam konflik Suriah merupakan bagian dari karakteristik diplomasi *multifaceted intervention*, salah satu konsep diplomasi dalam teori tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan Tiongkok. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah; pertama, dalam rangka mengupayakan agar terciptanya dialog damai antara pihak oposisi dan pihak pemerintah, Tiongkok mengundang kedua belah pihak untuk datang ke Beijing pada bulan Desember 2015. Hal itu dilakukan Tiongkok dalam rangka mendorong keduanya agar terlibat dalam dialog damai yang dilaksanakan di Jenewa pada Januari 2016, pertemuan di Beijing tersebut diwakilkan oleh Alptekin Hocaoglu dari pihak oposisi dan Walid al-Moallem dari pihak pemerintah. Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan dampak yang positif bagi kedua belah pihak dimana Tiongkok berhasil mengajak keduanya untuk hadir dalam dialog damai yang dilaksanakan di Jenewa. Kedua, Tiongkok mengirim utusan khusus untuk pertama kalinya ke wilayah konflik Suriah dengan tujuan untuk mempercepat terciptanya rekonsiliasi pihak pemerintah dan oposisi di negara tersebut. Saat itu, Guan Youfei bertemu dengan Menteri Pertahanan Suriah Fahad Jassim al-Frei. Dalam pertemuan tersebut, Tiongkok secara konsisten terus mendorong dan mendukung pencapaian resolusi konflik di Suriah.

Pada bab Selanjutnya penulis berusaha membuktikan adanya faktor yang mendorong keterlibatan Tiongkok dalam konflik Suriah berdasarkan tulisan artikel Sun dan Zoubir teori tentang diplomasi *quasi mediation*. Adapun alasan yang melatarbelakangi keterlibatan Tiongkok dalam penyelesaian konflik di Suriah adalah untuk menjaga stabilitas kawasan di Timur Tengah. Dalam bab III ini penulis melihat bahwa upaya yang dilakukan Tiongkok di konflik Suriah dilatarbelakangi oleh kepentingan komersial Tiongkok, dimana kebijakan Tiongkok tentang jalur *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan salah satu penyebab utama kehadiran Tiongkok dalam konflik Suriah, mengingat Suriah merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang termasuk dalam jalur *Belt and Road*, jadi sangat wajar jika Tiongkok ingin mengamankan jalur perdagangannya dari ancaman konflik. Bagaimana tidak, Konflik Suriah telah menghambat pembangunan proyek BRI menuju Eropa. Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi Tiongkok untuk memastikan keamanan rute pembangunan proyek BRI, khususnya rute BRI yang melewati Suriah.

Selain pengamanan jalur BRI, penulis mengamati adanya faktor lain yang mendorong Tiongkok untuk ikut andil dalam konflik yang terjadi di Suriah. Hal itu tidak lain adalah pelabuhan Tripoli yang berada di laut Mediterania, dimana pelabuhan tersebut dapat menjadi rute alternatif menuju terusan Suez. Dalam hal yang lain penulis juga melihat keterlibatan Tiongkok di Suriah merupakan representasi dari kebijakan *China Dream* yang diperkenalkan Xi Jinping, dimana Xi ingin memperluas peranannya di kawasan-kawasan lainnya dan ingin mempromosikan posisi penting Tiongkok di tatanan internasional. Lebih lanjut, penulis juga melihat bahwa keterlibatan Tiongkok didorong oleh keinginannya

untuk mencari teman baru untuk mendukungnya dalam forum-forum internasional yang akan datang.

Dari penjelasan diatas lima faktor pendorong kebijakan Tiongkok di konflik Suriah dengan *quasi mediation* yang dipaparkan Sun dan Zoubir, Tiongkok mampu memberikan pengaruhnya dalam upaya penyelesaian konflik Suriah dengan memperlihatkan peran Tiongkok sebagai aktor netral dan mampu mendorong kedua belah pihak yang berselisih untuk sepakat menjalin dialog damai. Sekaligus mencapai kepentingan Tiongkok dikawasan Timur Tengah.

IV.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan pada bab ini penulis berhasil membuktikan faktor yang mendorong Tiongkok untuk terlibat di dalam konflik Suriah yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Penulis melihat kompleksitas di dalam konflik Suriah menjadi sulitnya tercapai resolusi konflik, sehingga peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi guna melengkapi penelitian ini selanjutnya sebagai berikut:

1. Peneliti merekomendasikan keberlanjutan kebijakan Tiongkok di dalam konflik Suriah karena konflik ini belum selesai.
2. Peneliti juga merkomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melihat hambatan yang dihadapi negara-negara dalam penyelesaian konflik di Suriah, hingga akhirnya penyelesaian konflik berlarut-larut dan mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat Suriah.

DAFTAR PUSTAKA

- Compliance, B. o. (2000, Agustus 21). *World Military Expenditures and Arms Transfers 1998*. Retrieved from U.S Departement of State: https://1997-2001.state.gov/global/arms/bureau_vc/wmeat98fs.html
- Cammack, P., & Dunne, M. (2018, Oktober 23). *Fueling Middle East Conflicts*. Retrieved from carnegieendowment.org:
<https://carnegieendowment.org/2018/10/23/fueling-middle-east-conflicts-or-dousing-flames-pub-77548>
- Hadi, S., Setiawati, S. M., & Cipto, B. (2015, Maret 23). *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*. Retrieved from journal.umy.ac.id:
<http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2237/2187>
- Hasan, H. (2019, Maret 15). *Remembering the start of the Syrian Revolution*. Retrieved from Middle East Monitor :
<https://www.middleeastmonitor.com/20190315-remembering-the-start-of-the-syrian-revolution/>
- Olenrewaju, F., & Joshua, S. (2015). The Diplomatic Dimensions of the Syrian Conflict . *International Relations*, 43-63.
- Albasoos, H. (2017). An Overview of the Conflict in Syria. *Research in Business and Social Science*, 47-54.
- Sadek, L. S. (2016). *Russia's Resurgence in Syria; A New Coldwar?* Retrieved from dar.aucegypt.edu:

<http://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/4644/Russia%27s%20Resurgence%20in%20Syria.pdf?sequence=3>

Umbreen, J., & Waheed, M. (2016). China's Foreign Policy in the Middle East .

South Asian Studies, 321-331.

Olimat, M. S. (2010). The Political Economy of the Sino-Middle Eastern Relations .

Chinese Political Science, 307-335.

Sun, D., & Zoubir, Y. (2018). China's Participation in Conflict Resolution in the Middle East and North Africa: A Case of Quasi- Mediation Diplomacy?

Contemporary China, 224-243.

Tkacheva, O., Schwartz, L. H., Libicki, M. C., Taylor, J. E., Martini, J., & Baxter, C.

(2013). Internet Freedom and Political Change in Syria. *Internet Freedom and Political Space*, 73-91.

Wimmen, H. (2016). *SYRIA'S PATH FROM CIVIC UPRISING TO CIVIL WAR*.

Washington: Carnegie Endowment for International Peace.

Goulden, R. (2011). Housing, Inequality, and Economic Change in Syria. *British*

Journal of Middle Eastern Studies, 187-202.

Rivlin, P. (2011). The Socio-Economic Crisis in Syria. *Middle East Economy*, 1-17.

Council, S. (2011, Oktober 4). *Security Council Fails to Adopt Draft Resolution*

Condemning Syria's Crackdown on Anti-Government Protestors, Owing to

Veto by Russian Federation, China. Retrieved from UN.org:

<https://www.un.org/press/en/2011/sc10403.doc.htm>

Harris, P. (2012, Februari 4). *Syria resolution vetoed by Russia and China at*

United Nations. Retrieved from theguardian.com:

<https://www.theguardian.com/world/2012/feb/04/assad-obama-resign-un-resolution>

Olmert, J. (2012, April 15). *State Sectarianism in Syria: The Current Crisis and Its Background*. Retrieved from spme.org: <https://spme.org/campus-news-climate/state-and-sectarianism-in-syria-the-current-crisis-and-its-background/10590/>

Dam, N. V. (1996). *The Struggle for Power in Syria: Politics and Society under Asad and the Ba'th Party*. London: I.B Tauris.

Baltes, C. M. (2016, Mei 5). *Causes and Consequences of the Syrian Civil War*.

Retrieved from scholarcommons.sc.edu:

https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1106&context=senior_theses

Hof, F. C., & Simon, A. (2013, Maret 23). *Sectarian Violence in Syria's Civil War:*

Causes, Consequences, and Recommendations for Mitigation. Retrieved

from ushmm.org: <https://www.ushmm.org/m/pdfs/20130325-syria-report.pdf>

Ben-Tzur, A. (1968). The Neo-Ba'th Party of Syria. *Contemporary History*, 161-181.

Mohammed, A., & Al-Khalidi, S. (2013, Mei 22). *West may boost Syria rebels if*

Assad won't talk peace. Retrieved from reuters.com:

<https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis/west-may-boost-syria-rebels-if-assad-wont-talk-peace-idUSBRE94L0EZ20130522>

Gamboa, S. (2013, Mei 28). *McCain makes surprise trip to visit Syrian rebels*.

Retrieved from news.yahoo.com: <https://news.yahoo.com/mccain-makes-surprise-trip-visit-syrian-rebels-060216353.html>

Mardiani, D. (2012, Maret 14). *Bahas Suriah, Utusan Cina Bertemu Ketua Liga*

Arab. Retrieved from republika.co.id:

<https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/03/14/m0uliw-bahas-suriah-utusan-cina-%20bertemu-ketua-liga-arab>

Summers, T. (2013, September 20). *Syria Crisis: A Diplomatic Challenge for China*.

Retrieved from chathamhouse.org:

<https://www.chathamhouse.org/media/comment/view/194271>

Qingyun, W. (2016, Januari 7). *China looks to mediate Syria's civil war*. Retrieved

from chinadaily.com: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/07/content_22985419.htm

Tempo. (2016, Februari 4). *Konflik Suriah, Perundingan Damai Terancam Gagal*.

Retrieved from dunia.tempo.co:

<https://dunia.tempo.co/read/742140/konflik-suriah-perundingan-damai-terancam-gagal/full&view=ok>

Xinhua. (2016, Agustus 16). *叙利亚副总理兼国防部长弗拉杰会见中国军队外事代表团*. Retrieved from Xinhuanet.com:

http://www.xinhuanet.com//world/2016-08/16/c_1119396907.htm

http://www.xinhuanet.com//world/2016-08/16/c_1119396907.htm

Mingfu , L. (2009). *China Dream: The Great Power Thinking and Strategic Positioning of China in the Post-American Age*. Beijing: Zhongguo youyi chuban gongsi.

Jiechi, Y. (2013, September 10). *Implementing the Chinese Dream*. Retrieved from nationalinterest.org:

<https://nationalinterest.org/commentary/implementing-the-chinese-dream-9026>

Yi, W. (2013, September 27). *China at a New Starting Point* . Retrieved from gedebate.un.org:

https://gedebate.un.org/sites/default/files/gastatements/68/CN_en.pdf

Xinhuan. (2013, Juni 9). *中国梦与美国梦相通*. Retrieved from Xinhuanet.com:

http://www.xinhuanet.com//world/2013-06/09/c_124836150_2.htm

times, g. (2015, 12 21). *China to invite Syria factions to talks*. Retrieved from globaltimes.cn: <http://www.globaltimes.cn/content/959610.shtml>

REN, M. (2014). Interpreting China's (Non-)Intervention Policy to The Syrian Crisis: A Neoclassical Realist Analysis. *立命館國際研究* , 259-282.

Calabrese, J. (2019, Juli 9). *China and Syria: In War and Reconstruction*. Retrieved from mei.edu: <https://www.mei.edu/publications/china-and-syria-war-and-reconstruction>

Weitz, R. (2013). *Global Security Watch: China*. Santa Barbara: Praeger.

Maloof, M. (2016, Agustus 16). *China's 'quiet presence' in the Middle East*.

Retrieved from youtube.com:

<https://www.youtube.com/watch?v=OpL99gfPI-o&t=22s>

Morris, H. (2018, Februari 10). *China extends helping hands to rebuild Syria* .

Retrieved from chinadaily.com:

<http://www.chinadaily.com.cn/a/201802/10/WS5a7e4f48a3106e7dcc13bee2.html>

Duffin, E. (2019, Juni 26). *Largest export countries worldwide 2017* . Retrieved

from statista.com: <https://www.statista.com/statistics/264623/leading-export-countries-worldwide/>

Anonim. (2016, Januari 15). *China Bersiap Pikul Peran Lebih Besar dalam Politik di Timur Tengah*. Retrieved from voaindonesia.com:

<https://www.voaindonesia.com/a/china-bersiap-pikul-peran-lebih-besar-dalam-politik-di-timur-tengah/3146356.html>

Hawat, S., & Dukhan, H. (2014, Desember 31). *The Islamic State and the Arab*

Tribes in Eastern Syria. Retrieved from e-ir.info: <https://www.e-ir.info/2014/12/31/the-islamic-state-and-the-arab-tribes-in-eastern-syria/>

Zulfqar, S. (2018). *Competing Interests of Major Powers in the Middle East: The Case Study of Syria and Its Implications for Regional Stabilit.*

PERCEPTIONS, 121-148.

Osborn, A., & Tsvetkova, M. (2019, Juni 13). *Putin says U.S.-Russia relations are*

getting 'worse and worse'. Retrieved from reuters.com:

<https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-putin/putin-says-u-s-russia-relations-are-getting-worse-and-worse-idUSKCN1TE0L7>

Workman, D. (2019, Oktober 27). *China's Top Trading Partners* . Retrieved from worldexports.com: <http://www.worldstopexports.com/chinas-top-import-partners/>

China. (2019, Agustus 2). Retrieved from ec.europa.eu:

<https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/>

How is China's energy footprint changing? (2018, Agustus 13). Retrieved from chinapower.csis.org: <https://chinapower.csis.org/energy-footprint/>

Ellyatt, H. (2019, September 27). *Are Russia and China the best of friends now?*

It's complicated, analysts say . Retrieved from cnbc.com:

<https://www.cnbc.com/2019/09/27/russia-and-chinas-relationship--how-deep-does-it-go.html>

Noi, G. S. (2019, Februari 13). *China 'tries to be friends with all Mid-East states'* .

Retrieved from straittimes.com:

<https://www.straitstimes.com/singapore/china-tries-to-be-friends-with-all-mid-east-states>

Jiadong, Z. (2016). *CHINA-MIDDLE EAST RELATIONS: NEW CHALLENGES AND NEW APPROACHES*. Copenhagen: Danish Institute for International Studies.

Kuperman, A. J. (2015, April). *Obama's Libya Debacle*. Retrieved from

foreignaffairs.com: <https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2019-02-18/obamas-libya-debacle>

Bader, J. A. (2005, September 6). *China's Role in East Asia: Now and the Future* .

Retrieved from brooking.edu: <https://www.brookings.edu/on-the-record/chinas-role-in-east-asia-now-and-the-future/>

China in the WTO: Past, Present and Future. (n.d.). Retrieved from wto.org:

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/s7lu_e.pdf

Sørensen, C. T. (2015). The Significance of Xi Jinping's "Chinese Dream" for Chinese Foreign Policy: From "Tao Guang Yang Hui" to "Fen Fa You Wei". *JCIR*, 53-73.

President Xi Jinping Delivers Important Speech and Proposes to Build a Silk Road Economic Belt with Central Asian Countries. (2013, September 7).

Retrieved from fmprc.gov.cn:

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml

Xinhua. (2015, Maret 3). *China unveils action plan on Belt and Road Initiative*.

Retrieved from chinadaily.com:

https://www.chinadaily.com.cn/business/2015-03/28/content_19938124.htm

Legarda, H. (2018, 8 22). *China as a conflict mediator Maintaining stability along the Belt a*. Retrieved from merics.org: <https://www.merics.org/en/china-mapping/china-conflict-mediator>

Labate, D. (2014, Maret 10). *The role of China in Syria crisis*. Retrieved from mediterraneanaffairs.com: <http://mediterraneanaffairs.com/the-role-of-china-in-syria-crisis/>

Wimmen, H. (2016). *Syria's Path From Civic Uprising to Civil War*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.

Borger, J. (2018, April 14). *Syria: who are the key players in the conflict?*

Retrieved from theguardian.com:

<https://www.theguardian.com/world/2018/apr/14/syria-conflict-assad-putin-russia-iran-israel>

Zreik, M. (2019). China's Involvement In The Syrian Crisis and The Implication of Its Neutral Stance In The War. *Political Science*, 56-65.

Taylor, A. (2017, Maret 13). *Bashar al-Assad says relations between Syria and China are 'on the rise'*. Retrieved from thewashingtonpost.com:

<https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/12/bashar-al-assad-says-relations-between-syria-and-china-are-on-the-rise/>

Erdogan, U. (2014, 12 1). *Uighur involved in fight against Syrian regime*.

Retrieved from aa.com.tr: <https://www.aa.com.tr/en/politics/uighur-involved-in-fight-against-syrian-regime/96530>

Yuhas, A., Borger, J., Ackerman, S., & Shaun Walker. (2015, September 30).

Russian airstrikes in Syria: Pentagon says strategy 'doomed to failure' – as it happened. Retrieved from

[https://www.theguardian.com/world/live/2015/sep/30/russia-syria-air-strikes-us-isis-live-updates?page=with:block-](https://www.theguardian.com/world/live/2015/sep/30/russia-syria-air-strikes-us-isis-live-updates?page=with:block-560c186ee4b025318eb6e053#block-560c186ee4b025318eb6e053)

[560c186ee4b025318eb6e053#block-560c186ee4b025318eb6e053:](https://www.theguardian.com/world/live/2015/sep/30/russia-syria-air-strikes-us-isis-live-updates?page=with:block-560c186ee4b025318eb6e053#block-560c186ee4b025318eb6e053)

[theguardian.com](https://www.theguardian.com)

Xiaokun, L. (2016, Januari 5). *Syrian opposition leader to start 4-day Beijing visit* .

Retrieved from ChinaDaily.com:

http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/05/content_22932562.htm

Syria ready to take part in Geneva peace talks: Minister. (2015, Desember 24).

Retrieved from hurriyetdailynews.com:

<http://www.hurriyetdailynews.com/syria-ready-to-take-part-in-geneva-peace-talks-minister-92942>

Resolution 2254 . (2015, Desember 18). Retrieved from

securitycouncilreport.org:

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2254.pdf

Swaine, M. D. (2012, Agustus 22). *Chinese Views of the Syrian Conflict*. Retrieved

from carnegieendowment.org:

https://carnegieendowment.org/files/Swaine_CLM_39_091312_2.pdf

Ministry of External Affairs Government of India. (2004, June). *Panchsheel*.

Retrieved from www.mea.gov.in:

http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/191_panchsheel.pdf

Ahmad, T. (2019, April 19). *China's Belt and Road Initiative embraces the Middle*

East. Retrieved from arabnews.com:

<https://www.arabnews.com/node/1484966>

(n.d.). 121-